



**PENGELOLAAN PEMBELAJARAN BAGI ANAK BERKEBUTUHAN
KHUSUS (STUDI KASUS DI PAUD EFATA KOTA SEMARANG)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Pendidikan Pada Program Studi
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini**

Oleh:

Roby Naufal Arzaqi

1601415070

PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2019

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya menyatakan bahwa keseluruhan isi dari skripsi yang saya ajukan dengan judul **“Pengelolaan Pembelajaran Bagi Anak Berkebutuhan Khusus (Studi di PAUD EFATA Kota Semarang)”** tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya yang diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam skripsi ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 23 Agustus, 2019



Roby Naufal Arzaqi
1601415070



Scanned with
CamScanner

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui pembimbing untuk diajukan dalam Sidang Ujian Skripsi
pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 23 Agustus 2019

Mengetahui,

Ketua Jurusan PG-PAUD



Mukminin, S.Pd., M. Kes
NIP. 197803302005011001

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Diana", written over a faint, oval-shaped stamp.

Diana, S.Pd, M.Pd
NIP. 198309012008012011

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan sidang panitia ujian skripsi Jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 06 September 2019

Panitia Ujian Skripsi



Achmad Rifai RC. M.Pd
NIP. 195908211984031006

Sekretaris

Diana, S.Pd, M.Pd
NIP. 198309012008012011

Penguji I

Henny Puji Astuti, S.Psi., M.Si
NIP. 197711052010122002

Penguji II

R. Agustinus Arum Eka Nugroho, S.Pd., M.Sn.
NIP. 198008282010121003

Penguji III

Diana, S.Pd, M.Pd
NIP. 198309012008012011

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

1. **FABIAYYI AALAAA I ROBBIKUMAA TUKADZIBAAN:** Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan (Q.S Ar Rahman ayat 13, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77).
2. **Jarib Walahidzh Takun Aarifan:** Cobalah dan perhatikanlah, niscaya kau jadi orang yang tahu. (Mahfudzot 10)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis sembahkan untuk:

- 1) Drs. Ahmad Pamuji, St. dan Siti Muslihati, S. Kep, Ns yang telah memberikan nafkah, cinta dan kasih secara lahir dan batin yang tiada henti, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
- 2) Teman seperjuangan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu: mahasiswa lintas angkatan PG-PAUD UNNES, AL-ASROR 2015, mahasiswa PG-PAUD 2015, dan teman-teman KKN AB 2018 Kinabalu, Sabah, Malaysia.
- 3) Jurusan PG-PAUD serta almamater tercinta.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat serta hidayah-Nya sehingga skripsi yang berjudul “Pengelolaan Pembelajaran Bagi Anak Berkebutuhan Khusus (Studi di PAUD EFATA Kota Semarang) dapat terselesaikan dengan baik. Penyelesaian skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi persyaratan agar memperoleh gelar Sarjana Pendidikan”

Keberhasilan penelitian sampai dengan tersusunnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, dengan rendah hati disampaikan terimakasih kepada:

- 1) Dr. Achmad Rifai RC, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan izin dalam penyusunan skripsi.
- 2) Edi Waluyo, S.Pd., M.Pd selaku Ketua Jurusan PG-PAUD UNNES yang telah memberikan kemudahan dalam proses penyusunan skripsi.
- 3) Diana, S.Pd., M.Pd selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan arahan selama penyusunan skripsi.
- 4) Segenap Dosen Jurusan PG-PAUD UNNES yang telah memberikan pengetahuan selama masa perkuliahan.
- 5) Yohana Sri Rahayu, S.Pd, dan Diana Wakyu Kartika, S.Pd selaku kepala sekolah dan guru kelas PAUD EFATA yang telah memberikan izin dan bantuan selama penelitian.
- 6) Kedua orang tua, saudara dan pihak-pihak yang selalu memberikan motivasi, nasehat, serta dukungan yang tiada henti.

7) Teman laki-laki seperjuangan Wahyu Dita W.S.K, Wilma Rahmah, dan teman-teman dekat yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada semua pembaca.

Semarang, 23 Agustus 2019

Penulis

Roby Naufal Arzaqi
NIM. 1601415070

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	i
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	i
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang Masalah	1
1.2.Rumusan Masalah	12
1.3.Tujuan Penelitian.....	12
1.4.Manfaat Penelitian.....	12
BAB II LANDASAN TEORI	13
2.1.Pengelolaan Pembelajaran	13
2.1.1.Pengertian Pengelolaan.....	13
2.1.2.Ruang Lingkup Pengelolaan	15
2.1.3.Tujuan Pengelolaan PAUD	16

2.1.4.Fungsi Pengelolaan PAUD.....	16
2.2. Pengertian Pembelajaran.....	21
2.2.1.Tujuan Pembelajaran	23
2.3. Anak Berkebutuhan Khusus.....	23
2.3.1.Pengertian Anak Berkebutuhan Khusus.....	23
2.3.2.Klasifikasi Anak Berkebutuhan Khusus.....	25
2.4.Pendidikan Inklusi	32
2.4.1.Pengertian Inklusi	32
2.4.2.Tujuan Pendidikan Inklusi.....	34
2.4.3.Landasan Pendidikan Inklusi	35
2.4.4.Manajemen Pembelajaran Inklusi	39
2.4.5.Perencanaan	41
2.4.6.Kurikulum.....	42
2.4.7.Model Pembelajaran.....	44
2.4.8.Metode Pembelajaran.....	46
2.4.9.Media.....	49
2.4.10.Setting Kelas	50
2.4.11.Pengorganisasian.....	52
2.4.12.Pengelolaan.....	58
2.4.13.Evaluasi	60

2.5. Penelitian Relevan	62
2.6. Kerangka Pikir.....	65
BAB II METODE PENELITIAN	68
3.1. Jenis Penelitian	68
3.2. Subjek Penelitian	69
3.3. Tempat Penelitian	70
3.4. Sumber Data Penelitian	71
3.4.1. Sumber Data Primer	71
3.4.2. Sumber data Sekunder.....	72
3.5. Metode Pengumpulan Data.....	72
3.6. Fokus Penelitian	73
3.7. Pelaksanaan Penelitian.....	74
3.8. Metode Analisis Data	75
3.9. Pemeriksaan Keabsahan Data	78
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	82
4.1. Deskripsi Sekolah.....	82
4.1.1. Deskripsi Lokasi Penelitian	82
4.1.2. Identitas Sekolah.....	83
4.1.3. Visi, Misi, dan Tujuan Sekolah	84
4.1.4. Keadaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan	85

4.1.5.Keadaan Siswa	86
4.1.6.Kurikulum.....	87
4.1.7.Keadaan Sarana dan Prasarana PAUD EFATA	90
4.1.8.Ekstrakurikuler dan prestasi sekolah	91
4.2.Deskripsi Subjek Penelitian	91
4.3.Pengelolaan pembelajaran	93
4.3.1.Perencanaan	94
4.3.2.Pengorganisasian.....	110
4.3.3.Pengelolaan.....	120
4.3.4.Evaluasi	124
4.3.5.Faktor Pendukung Pengelolaan Pembelajaran.....	126
4.3.6.Faktor Penghambat Pengelolaan Pembelajaran.....	128
4.3.7. Keterbatasan Penelitian	130
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	131
5.1.Kesimpulan	131
5.2.Saran	134
5.2.1.Guru.....	134
5.2.2.Lembaga	134
DAFTAR PUSTAKA	135
LAMPIRAN	141

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Data jumlah sekolah Inklusif dan ABK di Kota Semarang Kecamatan Semarang Selatan Tahun Ajaran 2018/2019.....	10
Tabel 4.1. Identitas Sekolah.....	83
Tabel 4.2. Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan.....	85
Tabel 4.3. Jumlah peserta didik PAUD EFATA Tahun Ajaran 2019/2020.....	85
Tabel 4.4. Sarana dan Prasarana PAUD EFATA.....	88
Tabel 4.5. Data Prestasi Sekolah.....	103
Tabel 4.6. Deskripsi Subjek penelitian.....	103

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Triangulasi Bagan.....	61
Gambar 2.2. Kerangka Pikir	67
Gambar 4.1 Struktur Kurikulum PAUD EFATA tahun ajaran 2019/2020.....	87
Gambar 4.2. Foto kegiatan pembelajaran dan instrument penilaian.....	97
Gambar 4.3. Program Mingguan.....	102
Gambar 4.4. Program Harian.....	103
Gambar 4.5. Dokumen <i>Assesmen</i> anak.....	114-115

ABSTRAK

Arzaqi, Roby Naufal. 2019. “Pengelolaan Pembelajaran Bagi Anak Berkebutuhan Khusus (Studi Di PAUD EFATA Kota Semarang)”. Skripsi. Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Diana, S.Pd, M.Pd.

Kata Kunci: Pengelolaan Pembelajaran, Anak Berkebutuhan Khusus, PAUD EFATA.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Pengelolaan pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus studi di PAUD EFATA Kota Semarang. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pembelajaran di PAUD EFATA Kota Semarang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian deskriptif kualitatif dengan desain studi kasus berdasarkan teori Ley Kekeh Marthan. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara, observasi, dan teknik pengumpulan data (dokumen). Observasi dilakukan untuk mengetahui fenomena terkait dengan pengelolaan pembelajaran di dalam kelas mulai dari kegiatan pendahuluan sampai dengan kegiatan akhir. Hasil observasi ditindaklanjuti dengan mewawancarai tenaga pendidik di PAUD EFATA. Dokumen-dokumen yang dikumpulkan berfungsi sebagai data pendukung. Kemudian keabsahan data dilihat menggunakan triangulasi.

Hasil analisis data bahwa pengelolaan pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus di PAUD EFATA Kota Semarang ini terkait dengan perencanaan pembelajaran, pengorganisasian, pengelolaan, dan evaluasi pembelajaran yang mengacu kepada teori Ley Kekeh Martan dalam buku Manajemen Pendidikan Inklusif dan standar PAUD dalam Permendikbud No. 137 tahun 2014. Perencanaan pembelajaran meliputi penerapan kurikulum PAUD 2013, penyusunan rencana pembelajaran, model pembelajaran area, metode pembelajaran berbasis praktek, media pembelajaran *visual*, dan *setting* kelas didasari aspek keamanan dan kenyamanan bermain. Pengorganisasian meliputi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Pengelolaan berupa pelaksanaan supervisi dan pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat. Evaluasi meliputi hasil proses dan hasil pembelajaran, tindak lanjut yang terstruktur dalam program tahunan. Pengelolaan pembelajaran ini juga dipengaruhi oleh faktor pendukung berupa bimbingan, dan pemberian informasi dari HIMPAUDI Kota Semarang, adanya komitmen guru dan orang tua mendukung tercapainya tujuan lembaga. Faktor penghambat berupa belum tersedianya sarana yang memadai meliputi tempat pelaksanaan kegiatan, belum dimilikinya lahan pribadi dan izin lembaga.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (pasal 1 UU Sisdiknas No. 20/2003 ayat 1). Pendidikan berlangsung sejak manusia lahir dari kandungan ibunya sampai tutup usia. Pendidikan anak usia dini dimaknai sebagai “suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pembeian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut” (pasal 1 UU Sisdiknas No. 20/2003 ayat 14).

Pendidikan anak usia dini bertujuan untuk memberikan pengaruh positif berupa kerangka dasar bagi anak untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya serta bagi pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya (Diana, 2017). Sebagai upaya intervensi dini dengan pemberian rangsangan pendidikan guna menumbuhkan potensi serta sebagai upaya deteksi dini terhadap kemungkinan terjadinya gangguan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Pengaruh positif yang diberikan pada anak usia dini

adalah serangkaian program yang terencana, sistematis, dan berkelanjutan dalam bentuk interaksi edukatif antara pendidik dan anak. Terencana mengandung arti bahwa program pendidikan yang akan diberikan telah dirumuskan, disusun, dan ditentukan secara logis dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan potensi anak. Sistematis dapat memiliki arti terdapat bahan-bahan yang sudah berurut (*sequensial*) dan diklasifikasikan sesuai dengan program ranah perkembangan potensi anak.

Anak usia dini mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang pesat (Santrock, 2007). Anak berada dalam fase peka (*golden age*), fase dimana anak sensitif terhadap berbagai macam rangsangan pendidikan. Pertumbuhan sel-sel syaraf serta berkembangnya fungsi-fungsi jiwa yang membutuhkan berbagai stimulasi dan rangsangan positif dari lingkungan. Pada dasarnya anak siap merespon stimulasi yang diberikan oleh lingkungan. Masa ini sangat efektif untuk mengembangkan kemampuan kognitif, motorik, bahasa, sosial emosional, agama dan moral, dan seni yang dapat dicapai secara optimal dan mendukung perkembangan anak selanjutnya. Hal ini tentu saja dapat dicapai apabila tumbuh dan berkembang secara normal, berarti bahwa tidak ada gangguan yang diderita anak baik secara fisik, psikologis maupun perilakunya (Diana, 2017).

Badan Pusat Statistik (BPS) mempublikasikan data Susenas Triwulan I yang menyatakan sebanyak 9,9 juta anak Indonesia adalah anak berkebutuhan khusus (ABK) dalam kategori penyandang disabilitas (Winarsih, dkk, 2013). Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI

pada tahun 2014 juga mempublikasikan jumlah anak yang mengalami disabilitas di Indonesia. Berdasarkan data Susenas 2012 didapatkan estimasi penduduk Indonesia yang menyandang disabilitas sebesar 2,45% dan sekitar 39,97% dari jumlah tersebut mengalami lebih dari satu keterbatasan atau disabilitas (Primadi, 2014). Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997, Pasal 1, Ayat 1 tentang Penyandang Cacat, menyebutkan bahwa penyandang cacat (telah diubah menjadi penyandang disabilitas) merupakan orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan selayaknya, yang terdiri dari: a) penyandang cacat fisik, b) penyandang cacat mental, c) penyandang cacat fisik dan mental.

Definisi (Anak Berkebutuhan Khusus) ABK adalah anak yang memiliki keterbatasan atau keluarbiasaan, baik fisik, mental-intelektual, sosial, maupun emosional, yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain yang seusia dengannya (Winarsih, dkk, 2013). Winarsih, dkk (2013), dalam Buku Panduan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang dikeluarkan oleh Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, menyebutkan disabilitas berada dibawah klasifikasi ABK yang dibagi menjadi dua belas kategori, yaitu 1) anak disabilitas penglihatan, 2) anak disabilitas pendengaran, 3) anak disabilitas intelektual, 4) anak disabilitas fisik, 5) anak disabilitas sosial, 6) anak dengan gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas (GPPH), 7) anak dengan gangguan *spectrum*

autisme, 8) anak dengan gangguan ganda, 9) anak lamban belajar, 10) anak dengan kesulitan belajar khusus, 11) anak dengan gangguan kemampuan komunikasi, 12) anak dengan potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2017, jumlah anak berkebutuhan khusus (ABK) di Indonesia mencapai angka 1,6 juta anak. Salah satu upaya yang dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud, 2017) untuk memberikan akses pendidikan kepada mereka adalah dengan membangun unit sekolah baru, yaitu Sekolah Luar Biasa (SLB), dan mendorong tumbuhnya Sekolah Inklusi di daerah-daerah. Dari 1,6 juta anak berkebutuhan khusus di Indonesia, baru 18 persen yang sudah mendapatkan layanan pendidikan inklusi. Sekitar 115 ribu anak berkebutuhan khusus bersekolah di SLB, sedangkan ABK yang bersekolah di sekolah reguler pelaksana Sekolah Inklusi berjumlah sekitar 299 ribu. Untuk memberikan akses pendidikan kepada ABK yang tidak bersekolah di SLB, Kemendikbud telah menjalankan program Sekolah Inklusi. Sekolah Inklusi adalah sekolah reguler (non-SLB) yang juga melayani pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus. Di sekolah reguler, anak-anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak-anak reguler lainnya, dengan pendampingan guru khusus selama kegiatan belajar mengajar. Saat ini terdapat 32-ribu sekolah reguler yang menjadi Sekolah Inklusi di berbagai daerah. (Maulipaksi, 2017)

PERMENDIKNAS No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi, mewajibkan setiap daerah dapat menyelenggarakan sekolah inklusi. Paling tidak dalam satu Kecamatan memiliki minimal satu SD dan satu SMP yang

menyelenggarakan sekolah dengan sistem inklusi. Hal tersebut juga berimplikasi pada pendidikan prasekolah yang salah satu tujuannya adalah menyiapkan mental dan fisik anak didik untuk mengikuti jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Inklusi mempunyai pengertian yang beragam. Stainback (1990) mengemukakan bahwa sekolah inklusi adalah sekolah yang menampung semua siswa di kelas yang sama. Sekolah ini menyediakan program pendidikan yang layak, menantang, tetapi sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan setiap siswa. Lebih dari itu, sekolah inklusi juga merupakan tempat setiap anak dapat diterima, menjadi bagian dari kelas tersebut, dan saling membantu dengan guru dan teman sebayanya, maupun anggota masyarakat lain agar kebutuhan individualnya dapat terpenuhi.

Selanjutnya, Staub dan Peck (dalam Budiyanto, 2012:3-4) mengemukakan bahwa pendidikan inklusif adalah penempatan anak berkelainan tingkat ringan, sedang, dan berat secara penuh di kelas reguler. Hal ini menunjukkan bahwa kelas reguler merupakan tempat belajar yang relevan bagi anak berkelainan, apapun jenis kelainannya dan bagaimanapun gradasinya. Direktorat PLB (dalam Budiyanto 2005:18) mengatakan bahwa pendidikan inklusif adalah model pendidikan yang mengikutsertakan anak-anak yang berkebutuhan khusus untuk belajar bersama-sama dengan anak-anak sebayanya disekolah umum, dan pada akhirnya mereka menjadi bagian dari masyarakat sekolah tersebut sehingga tercipta suasana belajar yang kondusif. Pendidikan inklusif juga dapat diartikan sebagai sistem layanan pendidikan luar biasa yang mempersyaratkan agar semua anak luar biasa

dilayani di sekolah-sekolah terdekat di kelas biasa bersama teman-teman seusianya (O'Neil dalam Budiyanto, 2005:18).

Apabila sistem inklusi telah diselenggarakan sejak dini melalui pendidikan prasekolah, maka akan memberikan pengaruh dan kontribusi yang cukup signifikan baik bagi lembaga maupun peserta didik. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan Mulyono (dalam Wulan, 2014:71) yang merupakan Guru Besar Universitas Negeri Jakarta yang menggambarkan adanya anak luar biasa di sekolah bagi anak normal mencerminkan heterogenitas kemampuan anak di sekolah. Kemampuan anak yang memiliki heterogen, pendidikan kooperatif lebih unggul daripada pendidikan kompetitif. Sedangkan pada anak-anak yang berkemampuan *homogeny* pendidikan kompetitif lebih tinggi dari pada pendidikan integratif (Mulyono, 2009).

Menurut Suparno dalam Jurnal Pendidikan Khusus (2010), sekolah penyelenggara pendidikan inklusi, adalah sekolah umum yang telah memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditentukan. Beberapa persyaratan dimaksud diantaranya berkenaan dengan keberadaan siswa berkebutuhan khusus, komitmen, manajemen sekolah, sarana prasarana, dan ketenagaan. Sekolah penyelenggara pendidikan inklusi untuk anak berkebutuhan khusus haruslah memiliki siswa berkebutuhan khusus, memiliki komitmen terhadap pendidikan inklusi, penuntasan wajib belajar maupun terhadap komite sekolah. Selain itu juga harus memiliki jaringan kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait, yang didukung dengan adanya fasilitas dan sarana

pembelajaran yang mudah diakses oleh semua anak. Direktorat PSLB (2007) menjelaskan, bahwa sekolah inklusif adalah sekolah biasa yang terpilih melalui seleksi dan memiliki kesiapan baik kepala sekolah, guru, orang tua, peserta didik, tenaga administrasi dan lingkungan sekolah/ masyarakat) (Suparno, 2010).

Pada kenyataannya mengelola kelas dengan sistem inklusi bukanlah hal yang mudah untuk dilaksanakan. Sampai saat ini kendala yang seringkali dihadapi oleh sekolah-sekolah yang belum menjalankan inklusi adalah kesiapan guru untuk mengelola kegiatan belajar mengajar. Suwarsih menambahkan, untuk menjadi guru sekolah inklusi tidaklah mudah. Guru sekolah inklusi harus benar-benar sabar, peduli dan sungguh-sungguh mengerti keadaan, kemampuan, dan kebutuhan muridnya yang khusus (Widyarso dalam Wulan, 2014:71). Selain itu belum ada kesamaan persepsi guru di sekolah tentang keberadaan anak berkebutuhan khusus dan konsep sekolah inklusi juga menjadi kendala utama dalam implementasi pendidikan inklusi khususnya pada jenjang pendidikan prasekolah. Ketidaksamaan persepsi inilah yang kemudian mempengaruhi pola dan kemampuan mengajar guru yang tidak sesuai dengan konsep sekolah inklusi. Jadi masih banyak guru yang diciptakan hanya untuk mendidik siswa normal saja dan tidak siap untuk siswa berkebutuhan khusus.

Manajemen kelas atau sering dikenal dengan istilah pengelolaan kelas dapat dikatakan sebagai upaya guru menciptakan iklim kegiatan belajar mengajar di dalam kelas yang kondusif, dan tercipta hubungan interpersonal

yang baik antara guru, siswa, dan organisasi di luar kelas baik itu orang tua maupun komunitas warga sekolah lainnya. *Individuals With Disabilities Education Act* (IDEA) menguraikan bahwa anak yang memiliki keterbatasan harus dididik dalam lingkungan yang sama atau kelas yang sama dengan anak normal atau *Least Restrictive Environment (LER)* (Santrock, 2009:272). Semakin dini anak-anak tersebut mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan anak-anak pada umumnya, semakin optimal pertumbuhan dan perkembangannya kelak.

Pembelajaran dalam konsep pendidikan inklusif membutuhkan suatu strategi tersendiri, untuk peserta didik berkebutuhan khusus membutuhkan suatu strategi sesuai dengan kebutuhan masing-masing seperti yang dikatakan Kustawan dalam buku *Manajemen Pendidikan Inklusif* (2016) bahwa proses pembelajaran harus disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan setiap peserta didik (metode, media, dan sumber belajar). Seorang guru dalam sekolah inklusif ditekankan pada kemampuannya dalam pengelolaan kelas, selain itu guru harus memiliki kompetensi mengelola pembelajaran serta pemahaman terhadap peserta didik yang mempunyai ragam perbedaan. Oleh karena itu, dalam sekolah inklusif dibutuhkan guru yang mempunyai kompetensi sesuai bidangnya, yang mampu menangani anak berkebutuhan khusus secara maksimal. Misalnya untuk guru pembimbing khusus berlatar belakang pendidikan luar biasa. Akan tetapi pada kenyataannya guru yang mempunyai kompetensi sesuai dengan bidangnya sangat terbatas. Keterbatasan guru merupakan masalah utama

dalam penyelenggaraan sebuah pendidikan. Hal tersebut merupakan permasalahan yang harus mendapatkan penanganan dari pihak sekolah maupun pemerintah kota agar anak bekebutuhan khusus mendapatkan pendidikan yang layak dan maksimal. Hal lain yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif yaitu manajemen sekolah. Manajemen pendidikan inklusif menurut Marthan (2007:145) yaitu proses keseluruhan kegiatan bersama dalam bidang pendidikan inklusif yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan dan evaluasi dengan menggunakan dan memanfaatkan fasilitas yang tersedia baik personel, material, maupun spiritual untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Perencanaan sampai dengan evaluasi harus di persiapkan secara matang sehingga tujuan pendidikan inklusif dapat tercapai.

Keperdulian masyarakat terhadap pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan anak usia dini untuk usia 0 hingga 6 tahun menunjukkan perkembangan dengan tersedianya berbagai jenis layanan sesuai dengan kondisi dan kemampuan yang ada, baik dalam jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK) atau Raudatul Athfal (RA) dan bentuk lain yang sederajat, yang menggunakan program untuk anak sejak lahir hingga usia 6 tahun (Permendikbud No. 137 Tahun 2009). Satuan atau program PAUD adalah layanan PAUD yang dilaksanakan pada suatu lembaga pendidikan dalam bentuk Taman Kanak-kanak (TK)/Raudatul Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS). Namun pada tahun 2010,

Sekretaris Ditjen PAUDNI, Gutama menyatakan bahwa perubahan nomenklatur struktur Direktorat Jendral Nonformal dan Informal (Ditjen PNFI) menjadi Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (DITJEN PAUDNI) membawa pengaruh membesarnya cakupan garapan, termasuk di dalamnya dengan bergabungnya TK dalam satu payung. “Itu berarti tidak ada lagi dikotomi PAUD formal dan PAUD nonformal, keduanya berada dalam satu payung di bawah Direktorat Pembinaan PAUD (Latif, 2013:6). Adapun data sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di kota Semarang Kec. Semarang selatan:

Tabel 1.1 Data jumlah sekolah Inklusif dan ABK di Kota Semarang Kecamatan Semarang Selatan:

Instansi	Jumlah ABK
TK Sultan Agung	3 Anak
TK PL Bernadus	2 Anak
TK TA 08	1 Anak
TK Dian Asih	2 Anak
TK Al Hidayah	1 Anak
TK Pertiwi 1.05	1 Anak
TK Kuntum Mekar	1 Anak
Jumlah ABK : 11 Anak	

Sumber data: UPTD Pendidikan Kota Semarang Kec. Semarang tahun ajaran 2018/2019.

Berdasarkan data diatas sekolah percontohan inklusi yang ditunjuk resmi sebagai sekolah inklusif oleh pemerintah dirasa masih kurang dapat menampung banyak ABK. PAUD Inklusi EFATA adalah sekolah yang secara

alami mengembangkan pendidikan inklusif, memiliki 5 siswa dengan kebutuhan khusus. Mengemban misi kemanusiaan, pendidikan inklusif memiliki kecenderungan yang terjadi dilapangan meliputi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pendidikan inklusi. Yayasan EFATA didirikan oleh Windy Aryadewi yang berlokasi di jalan Lemah Gempal V kota Semarang. Efata adalah sebuah yayasan dimana di dalamnya terdapat Rumah Pintar (RumPin) yang sudah berdiri sejak tahun 2014 dan PAUD inklusi yang baru berdiri pada tahun 2018. PAUD inklusi berdiri atas keberhasilan RumPin dalam memfasilitasi anak-anak berkebutuhan khusus dan anak-anak normal untuk berkreasi dan memperoleh pengembangan diri melalui kegiatan ekstrakurikuler anak-anak usia sekolah (SLB, SD dan SMP). Keberhasilan tersebut tidak lepas dari konsep pendidikan gratis serta pendidikan bermakna dan berbudaya yang mendasari didirikannya yayasan EFATA. RumPin mendapati ada beberapa anak usia pra-sekolah yang mendaftarkan diri setiap tahunnya, sehingga didirikannya PAUD inklusi EFATA pada 2 April 2018.

Berdasarkan hasil observasi yang disampaikan diatas, peneliti memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan pembelajaran dan mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan pembelajaran anak berkebutuhan khusus yang dilaksanakan di PAUD EFATA Kota Semarang. Judul penelitian yang akan diambil yaitu **“Pengelolaan Pembelajaran Bagi Anak Berkebutuhan Khusus (Studi di PAUD EFATA Kota Semarang)”**

1.2. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana pengelolaan pembelajaran ABK di PAUD EFATA Kota Semarang?
- 2) Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan pembelajaran ABK di PAUD EFATA Kota Semarang?

1.3. Tujuan Penelitian

- 1) Mengetahui bagaimana pengelolaan pembelajaran ABK di PAUD EFATA Kota Semarang.
- 2) Mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan pembelajaran ABK di PAUD EFATA Kota Semarang.

1.4 Manfaat Penelitian

- 1) Bagi Lembaga Pendidikan
Sebagai bahan perbandingan guna peningkatan kualitas pembelajaran dan pengelolaan pembelajaran bagi ABK di Kota Semarang.
- 2) Bagi Orang Tua
Mengetahui upaya pemberian stimulasi positif bagi ABK, pengelolaan pembelajaran serta keberterimaan masyarakat mengenai kebutuhan khusus anak.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Pengelolaan Pembelajaran

2.1.1. Pengertian Pengelolaan

Menurut Haryoso (dalam Turyono, 2015) pengertian pengelolaan berasal dari kata kelola yang mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya. Sedangkan, Menurut Handyaningrat (1997:9) pengelolaan diartikan penyelenggaraan suatu kegiatan. Pengelolaan juga bisa diartikan manajemen, yaitu suatu proses kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan-penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan. Kemudian, Stoner (dalam Handoko, 2011:8) menyatakan manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Lebih lanjut manajemen dapat didefinisikan sebagai bekerja dengan orang-orang untuk menentukan, menginterpretasikan, dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penyusunan personalia atau kepegawaian (*staffing*), pengarahan dan kepemimpinan

(*leading*), dan pengawasan (*controlling*) (Handoko, 2011:10). Manajemen pendidikan merupakan proses manajemen dalam pelaksanaan tugas pendidikan dengan mendayagunakan segala sumber secara efisien untuk mencapai tujuan secara efektif. Hamalik (2008:28) dalam buku Manajemen Pengembangan Kurikulum mengemukakan rumusan operasional, bahwa :manajemen adalah suatu proses sosial yang berkenaan dengan keseluruhan usaha manusia dengan bantuan manusia serta sumber-sumber yang lainnya menggunakan metode yang efisien dan efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Lebih lanjut Hamalik (2008:8) dalam buku Manajemen Pengembangan Kurikulum mengemukakan rumusan operasional manajemen meliputi:

- 1) Manajemen merupakan suatu proses sosial yang merupakan suatu proses kerja sama antar dua orang atau lebih secara formal.
- 2) Manajemen dilaksanakan dengan bantuan sumber-sumber yakni manusia, material, biaya, dan informasi.
- 3) Manajemen dilaksanakan dengan metode kerja tertentu yang efisien dan efektif dari segi tenaga, dana, waktu, dsb.
- 4) Manajemen mengacu ke pencapaian tujuan tertentu, yang telah ditentukan sebelumnya.

Berdasarkan teori diatas dapat disimpulkan bahwa, istilah pengelolaan dapat diartikan manajemen dan didefinisikan sebagai kegiatan mengelola berbagai sumber daya dengan cara kerja sama dengan orang lain melalui proses tertentu untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

2.1.2. Ruang Lingkup Pengelolaan

Manajemen memerlukan adanya kerjasama, sekelompok orang, dan tujuan yang akan dicapai. Tentu dalam menjalani proses tersebut harus tepat sasaran dan tepat guna. Lebih lanjut, yang dikelola dalam manajemen adalah semua bentuk kegiatan yang dikelompokkan dalam komponen-komponen. Komponen-komponen manajemen pendidikan meliputi: a) manajemen kesiswaan, b) manajemen personil, c) manajemen kurikulum, d) manajemen sarana, e) manajemen pembiayaan, f) manajemen lembaga-lembaga pendidikan dan terakhir, g) manajemen hubungan masyarakat. (Arikunto, 2008:4).

Sejalan hal di atas, menurut Hikmat (2009:21) dalam buku Manajemen Pendidikan, manajemen adalah keseluruhan proses penyelenggaraan dalam usaha kerja sama dua orang atau lebih atau usaha bersama untuk mendayagunakan semua sumber (non material maupun material) secara efektif, efisien dan rasional untuk menunjangtercapainya tujuan pendidikan. Dari pernyataan tersebut selain kerjasama, sekelompok orang, dan tujuan ditambahkan sumber daya organisasi, baik personil maupun material juga mengungkapkan manajemen pendidikan manajer

kepala sekolah memiliki tugas untuk a) mengelola seluruh program pendidikan, b) mengelola aktivitas anak didik, c) mengelola personil lembaga pendidikan, d) mengelola pengadministrasian, e) mengelola kebendaharaan lembaga pendidikan, f) mengelola pelayanan bantuan tenaga kependidikan dan g) mengelola hubungan lembaga pendidikan dengan lingkungan masyarakat.

2.1.3. Tujuan Pengelolaan PAUD

Secara khusus manajemen organisasi mempunyai dua tugas utama yaitu efektifitas dan efisiensi. Memiliki makna *effective is to do the right something*, artinya efektif merupakan pencapaian tujuan atau target. Sedangkan, *efficiens is to do the something right*, adalah cara dalam mencapai tujuan atau target tersebut dengan memperkecil pengeluaran atau menekan pemborosan, sehingga dalam menjalankan roda organisasi atau sebuah lembaga dengan menggunakan sedikit sumber daya namun mencapai tujuan yang maksimal (UPI, 2011:88-89).

Manajemen PAUD bertujuan agar mencapai apa yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi manajemen PAUD dapat dimaknai sebagai terlaksananya semua program pendidikan dengan cara yang tepat serta melibatkan seluruh komponen lembaga PAUD sehingga tujuan PAUD secara organisator dapat tercapai.

2.1.4. Fungsi Pengelolaan PAUD

Fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh

manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Fungsi manajemen pertama kali diperkenalkan oleh seorang industrialis Prancis bernama Henry Fayol pada abad ke-20. Ketika itu, ia menyebutkan lima fungsi manajemen yaitu merancang, mengorganisir, memerintah, mengoordinasi, dan mengendalikan. Namun saat ini, kelima fungsi tersebut telah diringkas menjadi empat, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian (Ulfah, 2015:27-29).

1) Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan adalah memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan sumber yang dimiliki. Perencanaan dilakukan untuk menentukan tujuan perusahaan secara keseluruhan dan cara terbaik untuk memenuhi tujuan tersebut. Manajer mengevaluasi berbagai rencana alternatif sebelum mengambil tindakan dan kemudian melihat rencana yang dipilih apakah cocok dan dapat digunakan untuk memenuhi tujuan perusahaan, perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan selanjutnya.

2) Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Pengorganisasian mempermudah manajer dalam melakukan pengawasan dan menentukan orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah dibagi-bagi tersebut. Pengorganisasian dapat dilakukan dengan cara menentukan tugas apa yang harus dikerjakan, siapa yang harus mengerjakannya,

bagaimana tugas-tugas tersebut dikelompokkan, siapa yang bertanggung jawab atas tugas tersebut, pada tingkatan mana keputusan harus di ambil.

3) Pengarahan (*Directing*)

Pengarahan adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi. Fungsi lainnya adalah *actuating* adalah menggerakkan orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya atau penuh kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif. Dalam hal ini yang dibutuhkan adalah kepemimpinan. Fungsi pimpinan sebagai pembentuk kultur akademis diungkapkan oleh Peter Dobin dan Johnson (dalam Ulfah, 2015) bahwa :

Para pimpinan sekolah khususnya dalam kapasitasnya menjalankan fungsinya sangat berperan penting dalam dua hal yaitu: a). mengkonseptualisasikan visi dan perubahan dan, b). Memiliki pengetahuan, keterampilan dan pemahaman untuk mentransformasikan visi menjadi etos dan kultur akademis ke dalam aksi riil.

Terbentuknya kultur akademis bisa dicapai melalui proses tranformasi dan perubahan tersebut sebagai metamorphosis institusi akademis menuju kultur akademis yang ideal. Budaya itu sendiri masuk dan terbentuk dalam pribadi seorang akademisi melalui adanya adaptasi dengan lingkungan.

4) Pengevaluasian (*Evaluation*)

Pengevaluasian adalah proses pengawasan dan pengendalian performa perusahaan untuk memastikan bahwa jalannya lembaga sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Seorang manajer dituntut menemukan masalah yang ada dalam operasional perusahaan, kemudian memecahkannya sebelum masalah menjadi semakin besar. Penerapannya dalam konteks kelembagaan PAUD, maka fungsi dari manajemen adalah melakukan; perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengevaluasian dalam seluruh proses penyelenggaraan pendidikan. Karena kualitas lembaga PAUD dipengaruhi oleh penataan sistem, penataan ruang kelas, stuktur pengetahuan yang terdapat dalam kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana serta segala hal yang menunjang proses belajar mengajar secara komprehensif manajemen harus terimplementasikan dengan baik.

Sedangkan menurut Hamalik (2008:33-34) dalam buku Manajemen Pengembangan Kurikulum membagi fungsi manajemen menjadi lima yaitu: merencanakan, mengorganisasikan, menyusun staf, mengarahkan, dan mengontrol:

1) Fungsi perencanaan

Pengembangan suatu rencana harus mengacu ke masa depan (*forecast*) atau menentukan pengaruh pengeluaran biaya atau keuntungan, menetapkan perangkat tujuan atau hasil akhir, mengembangkan strategi untuk mencapai tujuan akhir, menyusun program yakni menetapkan skala

prioritas dan urutan strategi, anggaran biaya atau alokasi sumber-sumber, menetapkan prosedur kerja dengan metode baru, dan mengembangkan kebijakan-kebijakan berupa aturan dan ketentuan.

2) Fungsi pengorganisasian

Meliputi kegiatan-kegiatan membentuk/ mengadakan struktur organisasi baru, dan menetapkan garis hubungan kerja antar struktur yang ada dengan struktur yang baru, merumuskan komunikasi dan hubungan-hubungan, menciptakan deskripsi kedudukan dan menyusun kualifikasi tiap kedudukan menunjuk apakah rencana dapat dilaksanakan oleh organisasi yang ada atau perlu diperlukan orang lain yang memiliki keterampilan khusus.

3) Fungsi *staffing*

Meliputi kegiatan seleksi calon tenaga staf, memberikan orientasi kepada tenaga staf kearah pekerjaan dan tugas serta melakukan pembinaan ketenagaan.

4) Fungsi pengarahan

Meliputi langkah-langkah pendelegasian atau pelimpahan tanggung jawab dan akuntabilitas, memotivasi, dan mengkoordinasikan agar usaha-usaha kelompok serasi dengan usaha lainnya. Merangsang perubahan bila terjadi perbedaan/ pertentangan untuk mencari pemecahan/ penyelesaian sebelum mengerjakan tugas-tugas berikutnya.

5) Fungsi kontrol

Meliputi kegiatan pengadaan sistem pelaporan yang serasi dengan struktur pelaporan keseluruhan, mengembangkan standar perilaku, mengukur hasil berdasarkan kualitas yang diinginkan dalam kaitannya dengan tujuan, melakukan tindakan koreksi dengan memberikan ganjaran.

2.2. Pengertian Pembelajaran

Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran sebagai proses belajar yang dibangun oleh guru untuk mengembangkan kreatifitas bafikir yang dapat meningkatkan kemampuan bepikir siswa, serta dapat meningkatkan kemampuan mengkontruksikan pengetahuan baru sebagai upaya meningkatkan penguasaan yang baik terhadap materi pembelajaran.

Menurut Hamalik (2008) pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material fasilitas, perlengkapan dan prosedur yang saling mempengaruhi tercapainya tujuan pembelajaran. Dari teori-teori yang dikemukakan banyak ahli tentang pembelajaran, lebih lanjut Hamalik mengemukakan 3 rumusan yang dianggap lebih maju, yaitu:

1. Pembelajaran adalah upaya mengorganisasikan lingkungan untuk menciptakan kondisi belajar bagi peserta didik.

2. Pembelajaran adalah upaya mempersiapkan peserta didik untuk menjadi warg masyarakat yang baik.
3. Pembelajaran adalah proses membantu siswa menghadapi kehidupan masyarakat sehari-hari.

Ciri-ciri dari pembelajaran dalam bukunya Sugandi, dkk (2000:25)

antara lain :

1. Pembelajaran dilakukan secara sadar dan direncanakan secara sistematis.
2. Pembelajaran dapat menumbuhkan perhatian dan motivasi siswa dalam belajar.
3. Pembelajaran dapat menyediakan bahan belajar yang menarik dan menantang bagi siswa.
4. Pembelajaran dapat menggunakan alat bantu belajar yang tepat dan menarik.
5. Pembelajaran dapat menciptakan suasana belajar yang aman dan menyenangkan bagi siswa.
6. Pembelajaran dapat membuat siswa siap menerima pelajaran baik secara fisik maupun psikologis.

Berdasarkan teori diatas dapat disimpulkan bahwa, istilah pengelolaan dapat diartikan manajemen dan didefinisikan sebagai kegiatan mengelola berbagai sumber daya dengan cara kerja sama dengan orang lain melalui proses tertentu untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

2.2.1. Tujuan Pembelajaran

Tujuan pembelajaran adalah perubahan perilaku dan tingkah laku yang positif dari peserta didik setelah mengikuti kegiatan belajar mengajar, seperti perubahan secara psikologis yang tertampil dan tingkah laku (*over behavior*) yang dapat diamati melalui alat indera oleh orang lain baik tutur katanya, hasil belajar, motorik, dan gaya hidupnya. Menurut Sugandi, dkk (200:25) tujuan pembelajaran adalah membantu siswa agar memperoleh pengalaman dan dengan pengalaman itu memperoleh tingkah laku yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan nilai atau norma yang berfungsi sebagai pengendali sikap dan perilaku siswa. Tujuan pembelajaran menggambarkan kemampuan atau tingkat penguasaan yang diharapkan dicapai oleh siswa setelah mengikuti suatu proses pembelajaran.

Pembelajaran diartikan sebagai suatu proses yang melibatkan guru dengan semua komponen tujuan, bahan, metode, dan alat serta penilaian. Jadi proses pembelajaran merupakan sistem yang saling terkait antar komponennya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2.3 Anak Berkebutuhan Khusus

2.3.1 Pengertian Anak Berkebutuhan Khusus

Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dulu disebut sebagai anak luar biasa, memiliki makna kata luar biasa merupakan julukan atau sebutan bagi mereka yang memiliki kekurangan atau mengalami berbagai kelainan dan penyimpangan yang tidak alami seperti orang normal pada umumnya.

(Hadist, 2006:5). Menurut Mulyono (dalam Illahi, 2013:137) mendefinisikan anak berkebutuhan khusus sebagai anak-anak yang tergolong cacat atau menyandang keturunan, dan juga anak potensial dan berbakat. Istilah anak berkebutuhan khusus tidak diartikan untuk menggantikan anak penyandang cacat atau luar biasa, melainkan memiliki pandangan yang lebih luas dan positif bagi anak dengan keberagaman yang berbeda (Sunanto, 2009).

Anak berkebutuhan khusus memiliki makna dan spektrum yang lebih luas dibandingkan dengan konsep pendidikan luar biasa. Paradigma dan keberagaman dalam pendidikan anak berkebutuhan khusus amat dihargai. Setiap anak memiliki latar belakang yang berbeda-beda sehingga dalam pribadi anak anak dimungkinkan terdapat kebutuhan khusus dan hambatan belajar yang berbeda pula. Latar belakang kehidupan yang berbeda membuat mereka disebut anak berkebutuhan khusus (ABK) yang membutuhkan pelayanan pendidikan lebih optimal daripada anak normal pada umumnya. (Illahi, 2013:137-138). Menurut Smart (dalam Iswari, 2007:43). bahwa ABK adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya. Istilah anak berkebutuhan khusus ditujukan pada segolongan anak yang memiliki kelainan atau perbedaan dari anak rata-rata normal dalam segi fisik, mental, emosi, sosial, atau gabungan dari ciri-ciri tersebut. Hal tersebut menyebabkan mereka mengalami hambatan untuk mencapai perkembangan yang optimal sehingga mereka memerlukan layanan pendidikan khusus untuk mencapai

perkembangan yang optimal. Oleh karena itu, seorang guru harus memahami perbedaan tersebut sehingga guru mampu memberikan program pembelajaran khusus untuk anak berkebutuhan khusus yang disesuaikan dengan kekhususannya.

Berdasarkan pengertian diatas anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki kelainan dan penyimpangan yang tidak dialami anak normal pada umumnya. Anak berkebutuhan khusus memiliki karakteristik cacat atau menyandang keturunan, dan juga anak potensial dan berbakat.

2.3.2 Klasifikasi Anak Berkebutuhan Khusus

Klasifikasi Anak Berkebutuhan Khusus, Secara umum Illahi (2013:139-140) membedakan anak berkebutuhan khusus dalam dua kelompok besar yaitu anak berkebutuhan khusus yang bersifat sementara dan anak berkebutuhan khusus yang bersifat tetap. Kategori tersebut kemudian dijabarkan oleh peneliti sebagai berikut:

- a. Anak berkebutuhan khusus yang bersifat sementara (temporer) adalah anak yang mengalami hambatan belajar dan hambatan perkembangan yang disebabkan oleh faktor-faktor eksternal. Misalnya anak yang mengalami gangguan emosi karena trauma, dan sebagainya. Hambatan belajar dan perkembangan pada anak berkebutuhann khusus ini masih bias dilakukan penyembuhan asalkan orangtua dan orang-orang terdekatnya mampu memberikan terapi penyembuhan yang bias mengembalikan kondisi kejiwaan menjadi normal kembali.

- b. Anak berkebutuhan khusus yang bersifat tetap (permanen) adalah anak-anak yang mengalami hambatan belajar dan hambatan perkembangan yang bersifat internal dan akibat langsung dari kondisi kecacatan, yaitu anak yang kehilangan fungsi salah sebagian ataupun beberapa indranya, gangguan perkembangan kecerdasan dan kognisi, gangguan gerak (motorik), dan sebagainya.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa mengemukakan klasifikasi anak dengan kebutuhan khusus sebagai berikut:

- a. Tunarungu

Winarsih (2007:22) mengemukakan bahwa tunarungu adalah suatu istilah umum yang menunjukkan kesulitan mendengar dari yang ringan sampai berat, digolongkan ke dalam tuli dan kurang dengar. Orang tuli adalah yang kehilangan kemampuan mendengar sehingga menghambat proses informasi bahasa melalui pendengaran, baik memakai ataupun tidak memakai alat bantu dengar dimana batas pendengaran yang dimilikinya cukup memungkinkan keberhasilan proses informasi bahasa melalui pendengaran. Tunarungu dapat diartikan sebagai keadaan dari seorang individu yang mengalami kerusakan pada indera pendengaran sehingga menyebabkan tidak bisa menangkap berbagai rangsang suara, atau rangsang lain melalui pendengaran. Anak yang termasuk memiliki hambatan pendengaran terdiri atas dua kategori yaitu mereka yang tuli

sejak dilahirkan disebut dengan *contingently deaf*, dan mereka yang tuli setelah dilahirkan disebut dengan *adventitiously deaf*.

b. Tunadaksa

Anak tunadaksa adalah anak yang mempunyai kelainan ortopedik atau salah satu bentuk berupa gangguan dari fungsi normal pada tulang, otot, dan persendian yang bisa karena bawaan sejak lahir, penyakit atau kecelakaan, sehingga apabila mau bergerak atau berjalan memerlukan alat bantu. Tunadaksa adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuromuscular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan, termasuk *celebral palsy*, amputasi, polio, dan lumpuh. Tingkat gangguan pada tunadaksa adalah (1) ringan yaitu memiliki keterbatasan dalam melakukan aktivitas fisik tetap dan masih dapat ditingkatkan melalui terapi, (2) sedang yaitu memiliki keterbatasan motorik dan mengalami gangguan koordinasi sensorik, (3) berat yaitu memiliki keterbatasan total dalam gerakan fisik dan tidak mampu mengontrol gerakan fisik (Desiningrum, 2016:92).

c. Tunagrahita

Anak tunagrahita memiliki IQ di bawah rata-rata anak normal pada umumnya, sehingga menyebabkan fungsi kecerdasan dan intelektual mereka terganggu yang menyebabkan permasalahan-permasalahan lainnya yang muncul pada masa perkembangannya. Oleh karena itu dalam keterangannya, Mulyati dalam buku Pendidikan Anak Tunagrahita (2010: 10) terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti :

1. Fungsi intelektual umum secara signifikan berada dibawah rata-rata, maksudnya bahwa kekurangan itu harus benar-benar meyakinkan sehingga yang bersangkutan memerlukan layanan pendidikan khusus. Sebagai contoh, anak normal rata-rata mempunyai IQ (*Intelligence Quotient*) 100, sedangkan anak tunagrahita memiliki IQ paling tinggi 70.
2. Kekurangan dalam tingkah laku penyesuaian (perilaku adaptif), maksudnya bahwa yang bersangkutan tidak/kurang memiliki kesanggupan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan usianya. Ia hanya mampu melakukan pekerjaan seperti yang dapat dilakukan oleh anak yang usianya lebih muda darinya.

Ketunagrahitaan berlangsung pada periode perkembangan, maksudnya adalah ketunagrahitaan itu terjadi pada usia perkembangan yaitu sejak konsepsi hingga usia 18 tahun.

Berdasarkan beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tunagrahita mengacu pada fungsi intelek umum yang berada di bawah rata-rata yang menyebabkan kesulitan dalam beradaptasi seperti kesulitan dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan usianya dan berlangsung sejak dalam kandungan hingga usia 18 tahun.

d. Tunalaras

Menurut Hallahan dan Kauffman (dalam Illahi, 2013:144-149) mendefinisikan gangguan emosi dan perilaku menjadi tiga ciri khas yang memengaruhi tingkat perkembangannya, antara lain: (1) tingkah laku

yang sangat ekstrim dan bukan hanya berbeda dengan tingkah laku anak lainnya, (2) suatu problem emosi dan perilaku kronis yang bersifat tidak muncul langsung, (3) tingkah laku yang tidak diharapkan oleh lingkungan karena bertentangan dengan harapan social dan kultural.

Batasan dari pengertian anak tunalaras adalah anak yang mengalami gangguan perilaku dan memberikan respon-respon kronis yang jelas tidak dapat diterima secara sosial oleh lingkungan dan atau perilaku yang secara personal kurang memuaskan, tetapi masih dapat dididik sehingga dapat berperilaku yang dapat diterima oleh kelompok sosial dan bertingkah laku yang dapat memuaskan dirinya sendiri. Berarti anak yang termasuk dalam gangguan perilaku kategori berat dan parah memerlukan intervensi yang intensif dan berkelanjutan serta dapat dilatih di rumah, atau kelas khusus, sekolah luar biasa, atau institusi berasrama khusus (Kauffman, 1997).

e. Tunanetra

Banyak batasan yang dikemukakan untuk menjelaskan buta atau tunanetra. Menurut Kauffman dan Hallahan (2006), berdasarkan sudut pandang pendidikan ada dua kelompok gangguan penglihatan:

1. Anak yang tergolong buta akademis (*educationally blind*) yakni anak tidak dapat menggunakan penglihatannya lagi untuk tujuan belajar huruf cetak. Program pembelajaran yang diberikan pada anak untuk belajar yakni melalui *visual senses* (sensori lain di luar penglihatan).

2. Anak yang melihat sebagian (*the partially sighted/low vision*). Anak dengan penglihatan yang masih berfungsi secara cukup, diantara 20/70 – 20/200, atau mereka yang mempunyai ketajaman penglihatan normal tapi medan pandangan kurang dari 20 derajat. Cara belajar yang utama untuk dapat memaksimalkan penglihatannya adalah dengan menggunakan sisa penglihatan yang dimiliki (visualnya).

f. Kesulitan Belajar

Menurut IDEA atau *Individuals with Disabilities Education Act Amendments* yang dibuat pada tahun 1997 dan ditinjau kembali pada tahun 2004: secara umum, anak dengan kesulitan belajar khusus adalah, anak-anak yang mengalami hambatan/penyimpangan pada satu atau lebih proses-proses psikologis dasar yang mencakup pengertian atau penggunaan bahasa baik lisan maupun tulisan. Hambatannya dapat berupa ketidakmampuan mendengar, berpikir, berbicara, membaca, menulis, mengeja atau berhitung. NJCLD (*the National Joint Committee on Learning Disabilities*) memaparkan definisi kesulitan belajar sebagai suatu terminologi umum yang dikaitkan pada sekelompok penyimpangan heterogen, ditunjukkan dengan kesulitan nyata dalam penguasaan dan penggunaan dari aktivitas mendengar, berbicara, membaca, menulis, berpikir, atau kemampuan matematik. Penyimpangan-penyimpangan ini bersifat intrinsik pada individu, diperkirakan karena terganggunya fungsi sistem syaraf pusat, dan bisa terjadi sepanjang kehidupan. Masalah dalam perilaku regulasi diri, persepsi sosial dan interaksi sosial dapat muncul

pada kesukaran belajar, tetapi tidak merupakan sumber utama dari kesukaran belajar. Menurut Mangunsong (2009) dalam Desiningrum (2016:9) walaupun kesukaran belajar bisa terjadi bersamaan dengan kondisi kecacatan lain (seperti, kerusakan sensoris, retardasi mental, gangguan emosional serius) atau karena pengaruh ekstrinsik (seperti perbedaan budaya, instruksi yang kurang memadai atau kurang tepat), ini bukanlah akibat dari kondisi-kondisi atau pengaruh-pengaruh tersebut.

g. Autis

Perilaku autistik digolongkan dalam dua jenis, yaitu perilaku yang eksekusif (berlebihan) dan perilaku yang defisit (berkekurangan). Perilaku eksekusif adalah hiperaktif dan tantrum (mengamuk) berupa menjerit, menggigit, mencakar, memukul, mendorong. Di sini juga sering terjadi anak menyakiti dirinya sendiri (*self-abused*). Perilaku defisit ditandai dengan gangguan bicara, perilaku sosial kurang sesuai, defisit sensori sehingga dikira tuli, bermain tidak benar dan emosi yang tidak tepat, misalnya tertawa-tawa tanpa sebab, menangis tanpa sebab, dan melamun.

World Health Organization's International Classification of Diseases (WHO ICD-10) mendefinisikan autisme (dalam hal ini khusus *childhood autism*) sebagai adanya keabnormalan dan atau gangguan perkembangan yang muncul sebelum usia tiga tahun dengan tipe karakteristik tidak normalnya tiga bidang yaitu interaksi sosial, komunikasi, dan perilaku yang diulang-ulang (*World Health Organization, 1992*). WHO juga mengklasifikasikan autisme sebagai gangguan perkembangan sebagai

hasil dari gangguan pada sistem syaraf pusat manusia. Autisme dimulai pada awal masa kanak-kanak dan dapat diketahui pada minggu pertama kehidupan. Dapat ditemukan pada semua kelas sosial ekonomi maupun pada semua etnis dan ras. Penderita autisme sejak awal kehidupan tidak mampu berhubungan dengan orang lain dengan cara yang biasa. Sangat terbatas pada kemampuan bahasa dan sangat terobsesi agar segala sesuatu tetap pada keadaan semula (rutin/monoton).

2.4. Pendidikan Inklusi

2.4.1. Pengertian Inklusi

Istilah terbaru yang dipergunakan untuk mendiskripsikan penyatuan bagi anak-anak berkelainan (penyandang hambatan/cacat) kedalam program sekolah-sekolah adalah inklusi (Smith, 2014:45). Banyak orang yang masih menganggap bahwa pendidikan inklusi hanya merupakan versi lain dari pendidikan luar biasa, padahal konsep utama dari pendidikan inklusi dan pendidikan luar biasa justru saling bertentangan. Pendidikan inklusif bukan merupakan nama lain dari SLB atau Sekolah Luar Biasa, akan tetapi, pendidikan inklusi merupakan pendidikan yang menggunakan pendekatan yang berbeda.

Inklusi adalah istilah terbaru yang dipergunakan untuk mendeskripsikan penyatuan bagi anak-anak berkelainan (penyandang hambatan/cacat) ke dalam program-program sekolah. Inklusi berasal dari kata bahasa Inggris yaitu *inclusion*. Bagi sebagian besar pendidik, istilah

ini dilihat sebagai deskripsi yang lebih positif dalam usaha-usaha menyatukan anak-anak yang memiliki hambatan dengan cara-cara yang realistis dan komprehensif dalam kehidupan pendidikan yang menyeluruh. (Smith, 2006:6) Inklusi dapat berarti bahwa tujuan pendidikan bagi siswa memiliki hambatan adalah, keterlibatan yang sebenarnya dari tiap anak dalam kehidupan sekolah yang menyeluruh. Inklusif dapat berarti penerimaan anak-anak yang memiliki hambatan ke dalam kurikulum, lingkungan, interaksi sosial dan konsep diri (visi-misi) sekolah.

Pendidikan inklusi adalah pendidikan reguler yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik yang memiliki kelainan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa pada sekolah reguler dalam satu kesatuan yang sistemik. Di Indonesia sendiri, pendidikan inklusi secara resmi didefinisikan sebagai sistem layanan pendidikan yang mengikutsertakan ABK belajar bersama dengan anak sebayanya di sekolah reguler yang terdekat dengan tempat tinggalnya (Ilahi, 2013:26). Pendidikan inklusif dalam Permendiknas No. 70 tahun 2009 didefinisikan sebagai sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang berkelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Pelaksanaannya pendidikan inklusif bertujuan untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak

berkebutuhan khusus dan mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan inklusi adalah sebuah filosofi pendidikan dan sosial. Inklusi memungkinkan semua orang adalah bagian yang berharga dalam kebersamaan apapun perbedaan mereka. Pendidikan ini berarti bahwa semua anak, terlepas dari kemampuan maupun ketidakmampuan mereka, latar belakang sosial-ekonomi, suku, latar belakang budaya atau bahasa, agama atau jenis kelamin, menyatu dalam komunitas sekolah yang sama. Pendidikan inklusif merupakan pendekatan yang memperhatikan bagaimana mentransformasikan sistem pendidikan sehingga mampu merespon keanekaragaman siswa yang memungkinkan guru dan siswa untuk merasa nyaman dengan keanekaragaman tersebut, serta melihatnya lebih sebagai suatu tantangan dan pengayaan dalam lingkungan belajar sari pada suatu problem.

2.4.2. Tujuan Pendidikan Inklusi

Tujuan pendidikan inklusi antara lain adalah untuk memeberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental dan sosial atau memeiliki

potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Selain itu pendidikan inklusif juga bertujuan mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik (Ilahi, 2013:39-40).

Gargiuslo (dalam Mudjito, 2012:12-13) mengemukakan bahwa tujuan pendidikan inklusi adalah memberikan intervensi bagi anak berkebutuhan khusus sedini mungkin agar:

- 1) Meminimalkan keterbatasan pertumbuhan dan perkembangan anak dan untuk memaksimalkan kesempatan anak terlibat dalam aktifitas normal.
- 2) Memungkinkan untuk mencegah terjadinya kondisi yang lebih parah dalam ketidakteraturan perkembangan sehingga menjadi anak yang tidak berkemampuan
- 3) Mencegah berkembangnya keterbatasan kemampuan lainnya sebagai hasil yang diakibatkan oleh ketidakmampuan utamanya.

2.4.3. Landasan Pendidikan Inklusi

Penyelenggaraan pendidikan inklusi didasarkan pada konsep keberagaman yang dimiliki oleh setiap individu. Penyelenggaraan pendidikan inklusi berpijak pada beberapa landasan hukum sebagai berikut:

a. Landasan Filosofis

Landasan filosofi utama program pendidikan inklusi di Indonesia adalah Pancasila yang merupakan lima pilar sekaligus cita-cita yang didirikan atas fondasi yang lebih mendasar lagi, yaitu semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" (Sumiyati, 2011:12) berdasarkan semboyan itu bangsa Indonesia membangun sistem pendidikannya. Filosofi Bhinneka Tunggal Ika mengajak kita untuk meyakini bahwa di dalam diri manusia bersemayam potensi kemanusiaan yang bila dikembangkan melalui pendidikan yang baik dan benar dapat berkembang tak terbatas (Arum, 2005:109). Dan, perlu diyakini pula bahwa potensi itu pun ada pada diri setiap ABK. Karena, seperti halnya ras, suku, dan agama di tanah Indonesia, keterbatasan pada ABK maupun keunggulan pada anak pada umumnya memiliki kedudukan yang sejajar. Berdasarkan penjelasan di atas, jelas bahwa keterbatasan ABK tidak dapat dijadikan alasan untuk menjadikan pendidikan bersifat segregatif dan eksklusif, sehingga pendidikan untuk ABK harus dipisahkan dengan anak pada umumnya. Karena dengan adanya pendidikan inklusif yang terintegrasi, peserta didik dapat saling bergaul dan memungkinkan terjadinya saling belajar tentang perilaku dan pengalaman masing-masing.

b. Landasan Yuridis

Landasan yuridis internasional penerapan pendidikan inklusif adalah *Deklarasi Salamanca* oleh para menteri pendidikan se-Dunia. Deklarasi ini merupakan penegasan kembali Deklarasi PBB tentang HAM

tahun 1948 dan berbagai deklarasi lanjutan yang berujung pada peraturan standar PBB tahun 1993 tentang kesempatan yang sama bagi individu berkelainan untuk memperoleh pendidikan sebagai bagian integral dari sistem pendidikan. Deklarasi Salamanca menekankan bahwa selama memungkinkan, semua anak seyogyanya belajar bersama-sama tanpa memandang kesulitan atau pun perbedaan yang ada. (Sumiyati, 2011:11)

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang dan zat adiktif lainnya juga dikategorikan sebagai anak berkebutuhan khusus. Selain anak-anak berkebutuhan khusus yang telah disebutkan di atas, anak-anak yang memiliki bakat dan/atau kecerdasan luar biasa juga dikategorikan sebagai anak-anak berkebutuhan khusus.

c. Landasan Pedagogis

Menurut Suparno (2010) dalam bukunya Pendidikan Inklusif untuk Anak Usia Dini di taman Kanak-Kanak menyatakan sebagai berikut:

- 1) Anak adalah seorang makhluk manusia yang memerlukan pendidikan (*homoeducandum*) serta dapat dididik (*homoeducable*).
- 2) Sebagai akibat dari kondisinya, anak berkebutuhan khusus memerlukan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya.
- 3) Anak adalah pribadi yang unik yang memiliki karakteristik, minat, kemampuan dan kebutuhan belajar yang berbeda.

d. Landasan Empiris

Penelitian tentang inklusi telah banyak dilakukan di negara-negara barat sejak 1980-an, namun penelitian yang berskala besar dipelopori oleh *The National Academy of Sciences* (Amerika Serikat). Hasilnya menunjukkan bahwa klasifikasi dan penempatan anak berkelainan di sekolah, kelas atau tempat khusus tidak efektif dan diskriminatif. Layanan ini merekomendasikan agar pendidikan khusus secara segregatif hanya diberikan terbatas berdasarkan hasil identifikasi yang tepat (Budiyanto 2009:11).

e. Landasan Spiritual

Islam mengajarkan pada umatnya dalam kehidupan kemasyarakatan, untuk saling berinteraksi sehingga menjadi satu kesatuan kemasyarakatan, yang utuh saling mengenal dan tolong menolong di dalam kebaikan, hal ini dijelaskan dalam Q.S. al-Hujurat ayat: 13. Allah berfirman:

“Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.(QS. al-Hujurat/49: 13”)

Ayat di atas memberikan pemahaman bahwa kita diciptakan dengan bermacam-macam latar belakang, dan seharusnya kita saling mengenal dan tolong menolong. Dengan adanya perbedaan, keanekaragaman budaya dan adat istiadat akan semakin berkembang serta memupuk rasa tenggang rasa diantara sesama (Basyirudin, 2002:114).

Dari Abu Hurairah ra, dia berkata, :

“Rasulullah s.a.w. bersabda: Janganlah kalian saling mendengki, saling berjualan dengan cara najsy, saling benci dan saling membelakangi. Dan janganlah kalian menjual barang di atas penjualan sebagian lainnya. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya, (dia) tidak mendzaliminya dan mengabaikannya, tidak menghina. Takwa itu di sini (seraya menunjuk dadanya tiga kali). Cukuplah seorang muslim dikatakan buruk jika dia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim atas muslim yang lain; haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. (HR. Muslim).

Hadits ini menjelaskan berapa tingginya kedudukan persaudaraan dalam Islam. Hadits ini juga mengandung perintah untuk menebarkan persaudaraan diantara sesama muslim. Maka kita tidak boleh saling mendzalimi, berdusta, dan menghina. Berdasarkan landasan pembelajaran inklusi di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan inklusi bukanlah pendidikan yang hanya bisa dipandang dengan sebelah mata, anak berkebutuhan khusus mempunyai hak yang sama dengan anak-anak normal lainnya untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan bermutu tinggi. Jika anak berkebutuhan khusus dididik dan dijaga dengan baik, mereka pun bisa tumbuh seperti anak normal lainnya (Suhadi, 2009:178).

2.4.4. Manajemen Pembelajaran Inklusi

Manajemen kelas atau sering dikenal dengan istilah pengelolaan kelas dapat dikatakan sebagai upaya guru menciptakan iklim kegiatan belajar mengajar di dalam kelas yang kondusif, dan tercipta hubungan interpersonal yang baik antara guru, siswa, dan organisasi di luar kelas baik itu orang tua maupun komunitas warga sekolah lainnya. Manajemen

pendidikan menurut Marthan, (dalam Febriana, 2016:19) adalah suatu proses yang merupakan daur (siklus) penyelenggaraan pendidikan dimulai dari perencanaan, diikuti oleh pengorganisasian, pengarahan, pelaksanaan, pemantauan, dan penilaian tentang usaha sekolah untuk mencapai tujuannya. Selain itu, Manajemen pendidikan inklusif menurut Marthanyaitu proses keseluruhan kegiatan bersama dalam bidang pendidikan inklusif yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan dan evaluasi dengan menggunakan dan memanfaatkan fasilitas yang tersedia baik personel, material, maupun spiritual untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien (Febriana, 2016:19-20).

Penerapannya dalam setting pendidikan inklusif menurut Marthan, (dalam Febriana, 2016:21) manajemen pendidikan inklusif menyangkut implementasi dari fungsi-fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan dan evaluasi sebagai berikut:

- 1) Perencanaan pendidikan inklusif merupakan kegiatan menetapkan tujuan serta merumuskan dan mengatur pendayagunaan manusia, keuangan, metode, peralatan serta seluruh sumber daya yang ada untuk efektivitas pencapaian tujuan pendidikan inklusif.
- 2) Pengorganisasian pendidikan inklusif menyangkut pembagian tugas untuk diselesaikan setiap anggota dalam upaya pencapaian tujuan yang telah direncanakan.

- 3) Pengelolaan pendidikan inklusif meliputi kepemimpinan, pelaksanaan supervisi, serta pengelolaan hubungan sekolah dengan masyarakat sehingga tujuan sekolah inklusif dapat tercapai.
- 4) Evaluasi pendidikan inklusif dilakukan untuk menilai apakah segala kegiatan yang dilakukan telah tercapai dengan tujuan yang ditetapkan.

2.4.5. Perencanaan

Langkah-langkah pemberian layanan yang diberikan terhadap anak berkebutuhan khusus dikemukakan oleh Tarmansyah (dalam Hartanti, 2017:196) menyatakan bahwa: pelayanan terhadap anak berkebutuhan khusus diawali dengan melakukan identifikasi dengan mengumpulkan data tentang kebutuhan khusus anak. Setelah dilakukan identifikasi, dilanjutkan dengan menganalisa dan mendiagnosa hasil pengumpulan data identifikasi. Setelah diketahui spesifikasi kebutuhan khusus anak, maka dibuat perencanaan terkait metode dan teknik, materi pelayanan, sarana dan prasarana, program latihan berjangka, penentuan mitra dan prosedur kerjasama yang akan dilakukan. Terakhir, melaksanakan perencanaan terapi yang telah dibuat dan mengevaluasinya (Hartanti, 2017).

Unsur penting yang terkandung dalam perencanaan pendidikan menurut Makmun (2007) dalam buku Perencanaan Pendidikan:

- 1) penggunaan analisis yang rasional dan sistematis dalam perencanaan pendidikan yang menyangkut metodologi dalam perencanaan.
- 2) proses pembangunan dan pengembangan pendidikan, bahwasanya perencanaan pendidikan dilakukan dalam rangka reformasi

pendidikan, yaitu suatu proses dari status sekarang menuju status perkembangan pendidikan yang dicita-citakan.

- 3) prinsip efektivitas dan efisiensi, artinya dalam perencanaan pendidikan memiliki fungsi ekonomis, misalnya dalam hal penggalian sumber-sumber pembiayaan pendidikan, alokasi biaya, hubungan pendidikan dengan tenaga kerja, hubungan pengembangan pendidikan dengan pertumbuhan ekonomi
- 4) kebutuhan dan tujuan peserta didik dan masyarakat (lokal, regional, nasional, dan internasional), artinya perencanaan pendidikan mencakup aspek internal dan eksternal dari keorganisasian sistem pendidikan itu sendiri.

Penerapannya dalam setting pendidikan inklusif menurut Marthan (dalam Febriana, 2016:21) manajemen pendidikan inklusif menyangkut implementasi dari fungsi manajemen yaitu perencanaan: perencanaan pendidikan inklusif merupakan kegiatan menetapkan tujuan serta merumuskan dan mengatur pendayagunaan manusia, keuangan, metode, peralatan serta seluruh sumber daya yang ada untuk efektivitas pencapaian tujuan pendidikan inklusif.

2.4.6. Kurikulum

Kurikulum merupakan salah satu komponen yang sangat menentukan dalam suatu sistem pendidikan, karena itu kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan dan sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengajaran pada semua jenis dan tingkat

pendidikan. Kurikulum yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi pada dasarnya menggunakan kurikulum reguler yang berlaku disekolah umum (Kustawan, 2016:96). Namun demikian karena ragam hambatan yang dialami peserta didik berkebutuhan khusus sangat bervariasi, mulai dari yang sifatnya ringan, sedang, sampai yang berat, maka dalam implementasinya, kurikulum reguler perlu dilakukan modifikasi (penyelarasan) sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Modifikasi (penyelarasan) kurikulum dilakukan oleh tim pengembang kurikulum di sekolah.

Penyesuaian kurikulum dalam penerapan pendidikan inklusi tidak harus terlebih dahulu menekan pada materi pelajaran, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana memberikan perhatian penuh pada kebutuhan peserta didik. Kurikulum hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan anak, yang selama ini anak dipaksakan mengikuti kurikulum. Oleh sebab itu hendaknya memberikan kesempatan untuk menyesuaikan kurikulum dengan anak. Modifikasi pertama adalah mengenai pemahaman bahwa teori model itu selalu merupakan representasi yang disederhanakan dari realitas yang kompleks. Modifikasi kedua adalah mengenai aspek kurikulum yang secara khusus difokuskan dalam pembelajaran yang akan dibahas lebih banyak dalam praktek pembelajaran.

Kurikulum yang digunakan di sekolah inklusi adalah kurikulum anak normal (regular) yang disesuaikan (dimodifikasi sesuai) dengan kemampuan awal dan karakteristik siswa. Lebih lanjut, menurut Direktorat

Pendidikan Luar Biasa, modifikasi dapat dilakukan dengan cara modifikasi alokasi waktu, modifikasi isi/materi, modifikasi proses belajar mengajar, modifikasi sarana dan prasarana, modifikasi lingkungan untuk belajar, dan modifikasi pengelolaan kelas. Dengan kurikulum akan memberikan peluang terhadap tiap-tiap anak untuk mengaktualisasikan potensinya sesuai dengan bakat, kemampuannya dan perbedaan yang ada pada setiap anak.

Modifikasi kurikulum dalam bidang isi/materi dapat dilakukan dengan kegiatan berikut (Kustawan, 2016:97):

- 1) Ketika pendidik memodifikasi tujuan maka secara otomatis materi pembelajaran juga harus dilakukan modifikasi.
- 2) Tidak semua materi perlu dimodifikasi.
- 3) Materi yang dimodifikasi adalah materi yang banyak dibutuhkan oleh Peserta Didik Berkebutuhan Khusus.
- 4) Modifikasi harus didasarkan pada kondisi tingkatan kemampuan peserta didik berkebutuhan khusus yang didasarkan pada hasil asesmen.

2.4.7. Model Pembelajaran

Model pembelajaran adalah suatu desain atau rancangan yang digunakan untuk menggambarkan proses rincian dan penciptaan situasi lingkungan yang memungkinkan anak guna terwujudnya tujuan pembelajaran dan perkembangan diri anak. Adapun komponen model pembelajaran meliputi: tujuan pembelajaran, tema, metode, media, teknik evaluasi Pemberian informasi, pendampingan, dan pelatihan dari

HIMPAUDI. Adapun beberapa model pembelajaran yang dilaksanakan di PAUD umumnya adalah model pembelajaran klasikal, sudut, area, dan sentra. PAUD Jateng (2015) membagi model-model pembelajaran tersebut meliputi:

1) Model pembelajaran klasikal

Model pembelajaran klasikal adalah pola pembelajaran dimana dalam waktu yang sama, kegiatan dilakukan oleh seluruh anak dalam satu kelas. Model pembelajaran klasikal merupakan model yang paling awal digunakan di PAUD, dengan sarana dan prasarana yang terbatas. Seiring perkembangan teori dan pengembangan model pembelajaran. Model pembelajaran klasikal sudah mulai ditinggalkan karena dirasa kurang memperhatikan minat anak.

2) Model pembelajaran Area

Model pembelajaran Area lebih memberikan kesempatan kepada anak didik untuk memilih dan melakukan kegiatan main sesuai dengan minat anak. pembelajarannya dirancang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan spesifik anak dan menghormati keberagaman budaya dan menekankan pada pengalaman belajar bagi setiap anak.

3) Model pembelajaran Sudut

Model pembelajaran sudut menggunakan kegiatan bermain berdasarkan sudut-sudut kegiatan. Menggunakan langkah-langkah pembelajaran yang hamper sama dengan model pembelajaran area,

namun sudut-sudut kegiatannya selayaknya lebih bervariasi dan sering diganti, disesuaikan dengan tema dan sub tema.

4) Model pembelajaran sentra

Model pembelajaran sentra berdasarkan sentra yang memiliki ciri utama yaitu pemberian pijakan (*scaffolding*) untuk membangun konsep aturan, ide, dan pengetahuan anak serta konsep bermain. Model pembelajaran ini berfokus kepada anak yang dalam proses pembelajarannya di sentra bermain dan pada saat anak berada dalam lingkaran. (PAUD Jateng, 2015, <http://paud.id/2015/05/4-model-pembelajaran-paud-pembelajaran-inovatif.html>).

2.4.8. Metode Pembelajaran

Metode adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Ini berarti metode digunakan untuk merealisasikan proses belajar mengajar yang telah ditetapkan (Sanjaya, 2008). Menurut Ginting (2008), metode pembelajaran dapat diartikan cara atau pola yang khas dalam memanfaatkan berbagai prinsip dasar pendidikan serta berbagai teknik dan sumberdaya terkait lainnya agar terjadi proses pembelajaran pada diri pembelajar. Dengan kata lain metode pembelajaran adalah teknik penyajian yang dikuasai oleh seorang guru untuk menyajikan materi pelajaran kepada murid di dalam kelas baik secara individual atau secara kelompok agar materi pelajaran dapat

diserap, dipahami dan dimanfaatkan oleh murid dengan baik (Ahmadi, 2005).

Adapun ciri-ciri metode yang baik untuk proses belajar mengajar menurut Fathurrohman (2007) adalah sebagai berikut:

- 1) Bersifat luwes, fleksibel dan memiliki daya yang sesuai dengan watak murid dan materi.
- 2) Bersifat fungsional dalam menyatukan teori dengan praktik dan mengantarkan murid pada kemampuan praktis.
- 3) Tidak mereduksi materi, bahkan sebaliknya mengembangkan materi.
- 4) Memberikan keleluasaan pada murid untuk menyatakan pendapat.
- 5) Mampu menempatkan guru dalam posisi yang tepat, terhormat dalam keseluruhan proses pembelajaran.

Efektif tidaknya suatu metode pembelajaran juga sangat dipengaruhi pada kemampuan guru dalam menggunakannya. Jalan terbaik adalah menggunakan kombinasi dari metode yang sesuai dengan karakteristik materi yang diajarkan, karakteristik siswa, kompetensi guru dalam metode yang akan digunakan dan ketersediaan sarana prasarana dan waktu. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penentuan metode pembelajaran adalah sebagai berikut (Yusuf, 1997):

- 1) Tujuan yang hendak dicapai. Tujuan yang ingin dicapai dalam proses belajar mengajar harus menjadi perhatian utama bagi seorang guru dalam menentukan metode apa yang dipakai (serasi).

- 2) Kemampuan guru. Misalnya seorang guru yang mahir dalam berbicara, maka bisa menggunakan metode ceramah disamping metode yang lain sebagai pendukungnya.
- 3) Anak didik. Guru dalam kegiatan belajar mengajar harus memperhatikan anak didik. Karena mereka mempunyai kemampuan, bakat, minat, kecerdasan, karakter, latar belakang ekonomi yang berbeda-beda. Oleh karena itu dengan latar belakang yang berbedabeda guru harus pandai dalam menentukan metode pembelajaran yang akan digunakan.
- 4) Situasi dan kondisi proses belajar mengajar dimana berlangsung.
- 5) Situasi dan kondisi proses belajar mengajar yang berada dilingkungan dekat pasar yang ramai akan berdampak pada metode pembelajaran yang akan digunakan, sehingga guru bisa menentukan metode pembelajaran yang sesuai di lingkungan tersebut.
- 6) Fasilitas yang tersedia. Tersedianya fasilitas seperti, alat peraga, media pengajaran dan fasilitas-fasilitas lainnya sangat menentukan terhadap efektif tidaknya suatu metode.
- 7) Waktu yang tersedia. Disamping hal-hal di atas, masalah waktu yang tersedia juga harus diperhatikan. Apakah waktunya cukup jika menggunakan metode yang akan dipakai atau tidak.
- 8) Kebaikan dan kekurangan suatu metode. Dari masing-masing metode yang ada, tentu memiliki kebaikan dan kekurangan.

2.4.9. Media

Media pembelajaran adalah segala bentuk alat komunikasi yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan/informasi dari sumber kepada anak didik yang bertujuan agar dapat merangsang pikiran, perasaan, minat dan perhatian anak didik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran (Asmariansi, 2016). Media pembelajaran merupakan wadah dari pesan yang disampaikan oleh sumber atau penyalurnya yaitu guru kepada sasaran atau penerima pesan yakni siswa kanak-kanak yang sedang melakukan pendidikan. Menurut Azar (dalam Asmariansi, 2016) bahwa media pembelajaran pendidikan secara umum dapat diartikan sebagai sarana atau prasarana yang dipergunakan untuk membantu tercapainya tujuan pembelajaran, secara khusus media pembelajaran sebagai alat, metode, dan teknik yang digunakan dalam rangka lebih mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara guru dan siswa dalam proses pembelajaran dan pengajaran di sekolah. Media dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan bagian tertentu dari kegiatan pembelajaran, memberikan penguatan maupun motivasi. Kembali kepada arti penting media dalam proses belajar mengajar yang dapat mengantarkan kepada tujuan pendidikan.

Media dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan bagian tertentu dari kegiatan pembelajaran, memberikan penguatan maupun motivasi. Kembali kepada arti penting media dalam proses belajar mengajar yang dapat mengantarkan kepada tujuan pendidikan. menurut Oemar Hamalik

dalam buku Media Pendidikan peranan media dalam proses belajar mengajar adalah untuk :

- 1) Mengatasi sifat unik pada setiap anak didik yang diakibatkan oleh lingkungan yang berbeda.
- 2) Media mampu memberikan variasi dalam proses belajar mengajar.
- 3) Memberikan kesempatan pada anak didik untuk mereview pelajaran yang diberikan.
- 4) Memperlancar pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dan mempermudah tugas para guru.

2.4.10. Setting Kelas

Pengaturan ruangan kelas merupakan usaha yang diarahkan untuk mewujudkan suasana belajar mengajar yang efektif dan menyenangkan serta dapat memotivasi murid untuk belajar dengan baik sesuai dengan kemampuan. Manajemen kelas merupakan usaha sadar untuk mengatur kegiatan proses belajar mengajar secara sistematis. Usaha sadar itu mengarahkan pada penyiapan bahan belajar, penyiapan sarana dan alat peraga, pengaturan ruang belajar, pewujudan situasi/kondisi proses belajar mengajar dan pengaturan waktu sehingga pembelajaran berjalan dengan baik dan tujuan kurikuler dapat dicapai (Prapsiwi, 2012). Tujuan utama penataan lingkungan fisik kelas ialah mengarahkan kegiatan siswa dan mencegah munculnya tingkah laku siswa yang tidak diharapkan melalui penataan tempat duduk, perabot, pajangan, dan barang-barang lainnya di dalam kelas.

Penataan tempat duduk adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh guru dalam mengelola kelas. Karena pengelolaan kelas yang efektif akan menentukan hasil pembelajaran yang dicapai. Dengan penataan tempat duduk yang baik maka diharapkan akan menciptakan kondisi belajar yang kondusif, dan juga menyenangkan bagi siswa. Hal ini sesuai dengan pendapat Winzer (Winataputra, 2003: 9-21) bahwa “penataan lingkungan kelas yang tepat berpengaruh terhadap tingkat keterlibatan dan partisipasi siswa dalam proses pembelajaran. Lebih jauh, diketahui bahwa tempat duduk berpengaruh jumlah terhadap waktu yang digunakan siswa untuk menyelesaikan tugas yang diberikan” (Prapsiwi, 2012).

Dikaitkan dengan pembelajaran anak usia dini yang memiliki karakteristik yang spesifik, maka pengaturan ruangan kelas harus mampu mendukung pembelajaran anak usia dini. Pengaturan tempat duduk secara berkelompok tersebut dimaksudkan agar anak dapat mendorong munculnya tingkah laku siswa yang diharapkan dan menghilangkan tingkah laku yang tidak diharapkan; mengembangkan hubungan interpersonal yang baik dan iklim sosio-emosional kelas yang positif; dan untuk menciptakan dan memelihara organisasi kelas yang efektif. Hal ini sesuai dengan pendapat Winataputra (2005: 9.4 – 9.6) yang mengatakan bahwa pengaturan ruangan kelas dapat dilakukan dengan tiga pendekatan, yaitu pendekatan modifikasi tingkah laku (*behavior modification approach*); pendekatan iklim sosio-emosional (*socio emotional climate approach*); dan pendekatan proses kelompok (*group process approach*).

Perencanaan pendidikan dalam pelaksanaannya tidak dapat diukur dan dinilai secara cepat, tapi memerlukan waktu yang cukup lama, khususnya dalam kegiatan atau bidang pendidikan yang bersifat kualitatif, apalagi dari sudut kepentingan nasional. Sejalan dengan pengertian tersebut berbanding lurus dengan alur pendidikan yang merupakan kegiatan pranata sosial yang hasilnya baru dapat diukur dan dinilai dalam waktu yang relatif lama, kecuali dalam jenjang pendidikan tertentu seperti halnya pendidikan tinggi atau jenis pendidikan tertentu.

2.4.11. Pengorganisasian

Pengorganisasian merupakan lanjutan dari fungsi perencanaan dalam sebuah sistem manajemen. Menurut Ranupandojo (dalam Makmun, 2007:21) pengorganisasian adalah kegiatan untuk mencapai tujuan yang dilakukan oleh sekelompok orang, dilaksanakan dengan membagi tugas, tanggung jawab, dan wewenang diantara mereka, ditentukan siapa yang menjadi pemimpin, serta saling berinteraksi secara aktif. Komponen-komponen yang ada harus saling berhunungan atau bersatu padu agar penyelenggaraan pendidikan inklusif ini berjalan sesuai tujuan. Komponen-komponen dalam penyelenggara pendidikan antara lain sebagai berikut:

1) Tenaga Pendidik

Pendidik atau guru adalah orang yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan peserta didik, oleh karena itu guru harus mempunyai kompetensi yang sesuai dengan bidangnya agar

pengajaran yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Kompetensi yang harus dimiliki oleh Guru menurut Mohammad, (dalam Febriana, 2016) adalah: 1) Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. 2) Kompetensi kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. 3) Kompetensi sosial : kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. 4) Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan mampu membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam standar Nasional Pendidikan.

Menurut Mudjito, dkk, (dalam Febriana, 2016) menyatakan bahwa kompetensi guru Inklusif adalah kemampuan guru untuk mendidik peserta didik berkebutuhan khusus dan untuk mendidik peserta didik berkebutuhan khusus jenis tertentu dalam bentuk :

- i. Menyusun instrumen asesmen pendidikan khusus
- ii. Melaksanakan pendampingan untuk pendidikan kebutuhan khusus

- iii. Memberikan bantuan layanan khusus
- iv. Memberikan bimbingan secara berkesinambungan untuk anak berkebutuhan khusus,
- v. Memberikan bantuan kepada siswa yang berkebutuhan khusus.

Direktorat PLB (2004:28) pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di kelas inklusi secara umum sama dengan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di kelas reguler. Namun demikian, karena didalam kelas inklusif disamping terdapat anak normal terdapat pula anak berkebutuhan khusus yang mengalami kelainana atau penyimpangan (baik fisik, intelektual, sosial, emosional dan sensoris neurologis) dibanding anak normal, maka dalam kegiatan menggunakan strategi, media dan metode harus disesuaikan dengan masing-masing kelainan. Budiyanto (2005) menjelaskan pada tahap ini guru melaksanakan program pembelajaran serta pengorganisasian siswa berkelainan di kelas reguler sesuai dengan rancangan yang telah disusun. Pelaksanaan pembelajaran dapat dilakukan melalui individualisasi pengajaran artinya; anak belajar pada topik yang sama, waktu dan ruang yang sama, namun dengan materi yang berbeda-beda. Cara lain proses pembelajaran dilakukan secara individual artinya anak diberi layanan secara individual dengan bantuan guru khusus. Proses ini dapat dilakukan jika dianggap memiliki rentang materi/keterampilan yang sifatnya mendasar (prerequisite). Proses layanan ini dapat dilakukan secara terpisah atau masih di kelas

tersebut sepanjang tidak mengganggu situasi belajar secara keseluruhan.

Hidayat dkk (2010:227-229) mengatakan pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari RPP. Pelaksanaan pembelajaran meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup.

a) Kegiatan pendahuluan, dalam kegiatan pendahuluan, guru:

1. Menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran.
2. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari.
3. Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai.
4. Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai RPPH.

b) Kegiatan inti

Pelaksanaan kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai KD yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.

Kegiatan inti menggunakan metode yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan tema sub tema, yang dapat meliputi proses eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi.

c) Kegiatan penutup, dalam kegiatan penutup, guru:

1. Bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran;
2. Melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram;
3. Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran;
4. Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, program pengayaan, layanan konseling dan/atau memberikan tugas, baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik;
5. Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya.

2) Guru Pembimbing Khusus/ GPK

Peraturan menteri pendidikan Nasional Nomor 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa menyebutkan bahwa pemerintah kabupaten/kota perlu menyediakan paling sedikit 1 (satu) orang guru pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang ditunjuk untuk menyelenggarakan pendidikan

inklusif. Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif yang tidak ditunjuk oleh pemerintah kabupaten/kota wajib menyediakan paling sedikit 1 (satu) orang guru pembimbing khusus. Pentingnya GPK di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif sesuai dengan pasal 41 PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan, bahwa “setiap satuan pendidikan yang melaksanakan pendidikan inklusif harus memiliki tenaga kependidikan yang mempunyai kompetensi menyelenggarakan pembelajaran bagi peserta didik dengan kebutuhan khusus” (Kustawan dalam Febriana, 2016).

Menurut Kustawan, (dalam Febriana 2016) tugas guru pembimbing khusus (GPK) antara lain :

- i. Menyusun program pembimbingan bagi guru kelas dan guru mata pelajaran.
- ii. Melaksanakan program bimbingan bagi guru kelas dan guru mata pelajaran.
- iii. Memonitor dan mengevaluasi program bimbingan bagi guru kelas dan guru mata pelajaran.
- iv. Memberikan bantuan profesional dalam penerimaan, identifikasi, asesmen, prevensi, intervensi, kompensatoris dan layanan advokasi peserta didik.
- v. Memberikan bantuan dalam pengembangan kurikulum, program pendidikan individual, pembelajaran, penilaian, media, dan sumber belajar serta sarana dan prasarana yang aksesibel.

- vi. Menyusun laporan program pembimbingan bagi guru kelas dan guru mata pelajaran.
- vii. Melaporkan hasil pembimbingan bagi guru kelas dan guru mata pelajaran kepada kepala sekolah, Dinas pendidikan dan yang terkait
- viii. Menindaklanjuti hasil pembimbingan bagi guru kelas dan guru mata pelajaran.

2.4.12. Pengelolaan

Pengelolaan pendidikan inklusif meliputi kepemimpinan, pelaksanaan supervisi, serta pengelolaan hubungan sekolah dengan masyarakat sehingga tujuan sekolah inklusif dapat tercapai (Marthan dalam Febriana, 2016:21). Peranan kepemimpinan kepala sekolah dalam kaitannya dengan pengembangan guru. Prinsip-prinsip kepemimpinan harus dikaitkan dengan peranan kepala sekolah dan kedudukan pimpinan lainnya yang relevan, peranan pemimpin khusus yang meliputi dengan staf, siswa, orang tua siswa dan orang lain diluar komunitas tempat sekolah itu berada. Peran kinerja kepemimpinan menurut Sutomo dalam buku Manajemen Sekolah (2016) meliputi:

a) Pembinaan Disiplin

Disiplin menjadi hal pokok yang harus dimiliki pemimpin, terutama disiplin diri. Pemimpin harus mampu membantu pegawai mengembangkan pola dan meningkatkan standar perilaku serta menggunakan pelaksanaan aturan sebagai alat penegak disiplin.

b) Pembangkitan Motivasi

Motivasi adalah keinginan yang menggerakkan atau mendorong seseorang atau diri sendiri untuk berbuat sesuatu. Adapun dorongan atau daya gerak untuk mendorong seseorang berbuat sesuatu menurut Maslow (dalam Sutomo, 2016:140). Kebutuhan seseorang tergantung pada apa yang dipunyai dan kebutuhan merupakan hierarki dilihat dari pentingnya. Maslow membagi kebutuhan menjadi lima kategori:

- 1) Kebutuhan fisiologis.
- 2) Kebutuhan rasa aman.
- 3) Kebutuhan kasih sayang.
- 4) Kebutuhan akan rasa harga diri.
- 5) Kebutuhan akan aktualisasi diri.

c) Penghargaan

Penghargaan merupakan yang sangat penting untuk meningkatkan kegiatan yang produktif dan mengurangi kegiatan yang kurang produktif. Penghargaan ini akan bermakna apabila dikaitkan dengan prestasi pegawai secara terbuka sehingga setiap pegawai memiliki peluang untuk meraihnya. Penghargaan dapat dilakukan secara tepat, efektif, dan efisien agar tidak menimbulkan dampak negatif.

Selanjutnya, pengelolaan hubungan sekolah dengan masyarakat guna mencapai tujuan bersama dapat dilakukan dengan cara kolaborasi. Kemitraan ini dapat melibatkan guru pendidikan umum, guru pendidikan khusus, staf pendukung seperti ahli terapi wicara dan konselor, tenaga

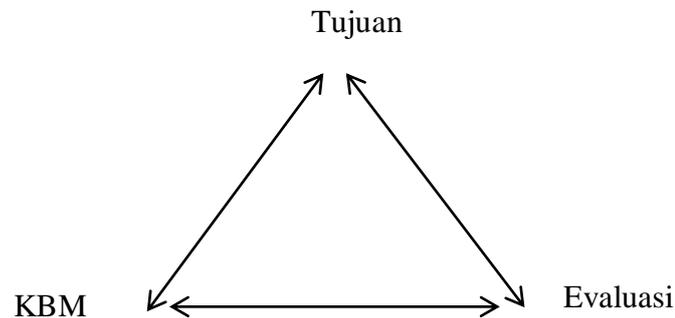
professional, orang tua, dan masyarakat sekitar. Tujuan umum yang dapat dicapai dari penerapan kolaborasi adalah berbagi pemecahan masalah baik formal maupun informal, pengajaran berpasangan, dan konsultasi (Friend, 2015:151-154).

2.4.13 Evaluasi

Evaluasi merupakan salah satu komponen sistem pembelajaran pada khususnya, dan sistem pendidikan pada umumnya. Artinya, evaluasi merupakan suatu kegiatan yang tidak mungkin dielakkan dalam suatu proses pembelajaran. Dengan kata lain, kegiatan evaluasi, baik evaluasi hasil belajar maupun evaluasi pembelajaran, merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari kegiatan pendidikan (Latif, 2013:147). Lebih lanjut, Arikunto (2013) dalam buku Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan menyatakan evaluasi bertujuan untuk melihat pencapaian target program guna menentukan seberapa jauh target sudah tercapai, yang dijadikan tolak ukur adalah tujuan yang sudah dirumuskan dalam tahap perencanaan kegiatan. Evaluasi diperlukan untuk kepentingan pengambil kebijaksanaan untuk menentukan kebijakan selanjutnya.

Adanya prinsip umum dan penting dalam kegiatan evaluasi, yaitu adanya triangulasi dan hubungan erat tiga komponen menurut Suharsimi Arikunto (2013) dalam buku Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan yaitu:

- 1) Tujuan Pembelajaran
- 2) Kegiatan pembelajaran atau KBM, dan
- 3) Evaluasi



Gambar 2.1. Triangulasi dalam bagan.

a) Hubungan antara Tujuan dengan KBM

Kegiatan belajar-mengajar yang dirancang dalam bentuk rencana mengajar disusun oleh guru dengan mengacu tujuan yang hendak dicapai. Hubungan antara tujuan dan KBM menunjukkan arah yang sama dengan makna bahwa KBM mengacu pada tujuan, tetapi juga mengarah dari tujuan ke KBM, menunjukkan langkah dari tujuan dilanjutkan pemikirannya ke KBM.

b) Hubungan antara Tujuan dengan Evaluasi

Evaluasi adalah kegiatan pengumpulan data untuk mengukur sejauh mana tujuan sudah tercapai. Anak panah dari evaluasi menuju ke tujuan, apabila dilihat dari langkah dalam penyusunan evaluasi ia mengacu pada tujuan yang sudah dirumuskan.

c) Hubungan antara KBM dengan Evaluasi

Seperti yang sudah disebutkan dalam nomor 1, KBM dirancang dan disusun dengan mengacu ada tujuan yang telah dirumuskan. Pada poin nomor 2, alat evaluasi juga disusun dengan mengacu pada tujuan.

Selain mengacu pada tujuan, evaluasi juga mengacu atau disesuaikan dengan KBM yang dilaksanakan. Menitikberatkan pada keterampilan, evaluasinya juga mengukur tingkat keberhasilan siswa, bukan aspek pengetahuan.

2.5. Penelitian Relevan

Penelitian ini terdapat beberapa penelitian relevan yang dapat dijadikan sebagai bahan kajian antara lain:

- 1) Penelitian yang dilakukan oleh Widya Masitah (2016) dengan judul “ Pendidikan Inklusif Anak Usia Dini“ yang di sampaikan dalam *The Progressive and Fun Education Seminar*. Penelitian ini menjelaskan tentang hambatan dalam pelaksanaan pendidikan inklusi yang tergolong tidak mudah. Banyak hal yang harus dipersiapkan dengan matang. Hambatan yang ada pada saat ini dalam melaksanakan pendidikan inklusif yaitu: 1) Kurangnya informasi kepada sekolah dan masyarakat tentang pendidikan inklusif, 2) Kurangnya sumber daya manusia yang latar belakang pendidikannya sesuai untuk sekolah inklusif. 3) Kurangnya terapis yang handal untuk menjadi pendamping di kelas sekolah inklusif. 4) Kurangnya sarana dan prasarana penunjang untuk melaksanakan pendidikan inklusif. Adanya beberapa hambatan dalam melaksanakan pendidikan inklusif maka harus ada solusi yang harus diambil agar pendidikan inklusif ini dapat terlaksana. Beberapa solusi tersebut yaitu : 1) Pemerintah agar dapat melaksanakan sosialisasi tentang pendidikan inklusif. 2) Memberi pendidikan kepada guru-guru paud tentang anak

berkebutuhan khusus . 3) Melaksanakan pelatihan untuk memperkaya ilmu terapi untuk guru-guru paud dan para terapis. 4) Memberikan bantuan kepada sekolah-sekolah agar dapat memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana agar pembelajaran pendidikan inklusi dapat terlaksana dengan baik.

- 2) Kedua, penelitian yang dilakukan Febriana Nur Umami (2016) dengan judul “Permasalahan dalam Pengelolaan Pendidika Inklusif di SDN Piyaman III Kecamatan WOnosari Kabupaten Gunungkidul” untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di SDN PIYAMAN III masih ditemukan adanya permasalahan dalam manajemen sekolah yang meliputi: 1) perencanaan yang dilakukan belum melibatkan semua guru, pegawai TU, admin sekolah serta komite sekolah, 2) pengorganisasian: pembagian tugas terkait penanganan anak berkebutuhan khusus ke guru kelas yang sudah pernah mengikuti pelatihan belum terlaksana dengan baik, guru masih kesulitan mengerjakan tugasnya 3) pengarahan: pengarahan kepala sekolah masih belum ditanggapi dengan baik, masih ada guru yang lambat dalam menanggapi arahan, 4) pengawasan: pengawasan kepala sekolah terkait program atau kegiatan belum menyeluruh, hanya sebatas bertanya tentang keterlaksanaan program saja. Permasalahan tenaga kependidikan: 1) belum adanya guru pembimbing khusus, 2) guru kelas yang ditugasi untuk menangani anak berkebutuhan khusus masih kesulitan dalam menanganinya. Berdasarkan

penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait upaya sekolah dalam mengatasi permasalahan dalam pengelolaan pendidikan inklusif sebagai berikut:

- 1) Manajemen Sekolah: perencanaan dengan pembagian tugas yang inklusif di dilakukan oleh kepala sekolah. 2) Tenaga kependidikan: pengorganisasian dan pengarahan 1) menugaskan guru kelas untuk merangkap menjadi guru pembimbing khusus untuk anak berkebutuhan khusus, 2) untuk guru kelas yang ditugasi merangkap menjadi guru pembimbing khusus diikutkan dalam pelatihan mengenai pendidikan inklusif di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul.
- 3) Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Sri Hartanti (2017) dengan judul “Pelayanan Anak Berkebutuhan Khusus di Taman Kanak-kanak Tiji Salsabila Kota Padang Paedagogi” yang di terbitkan dalam Jurnal Anak Usia Dini dan Pendidikan Anak Usia Dini. Berdasarkan temuan penelitian, guru TK inklusi tidak melaksanakan langkah-langkah pelayanan terhadap anak berkebutuhan khusus sesuai teori. Guru TK inklusi hanya bertugas melayani anak secara klasikal dan tidak memberikan bantuan khusus sesuai dengan kelainan yang dialami anak secara optimal karena guru TK tidak memiliki pemahaman cara melayani anak sesuai dengan kebutuhan yang dimilikinya, karena guru TK inklusi berlatar belakang Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini umum dan tidak memiliki pengetahuan tentang anak berkebutuhan khusus. Guru juga hanya membantu

mengarahkan anak sesuai dengan kesulitan yang dialami anak dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru dalam proses pembelajaran. Hal ini tentunya menjadi kendala tersendiri bagi guru karena guru tidak sepenuhnya bisa menghadapi anak dengan cara yang seharusnya. Terkadang guru tidak mampu untuk menangani anak dan membutuhkan bantuan dari GPK untuk menenangkan anak yang memiliki keberagaman kelainan. Berdasarkan kendala yang dialami guru dalam melayani ABK pada TK inklusi salsabila, maka temuan penelitian ini memberikan kontribusi bagi lembaga terkait agar guru TK Inklusi Khususnya TK inklusi Tiji Salsabila diberi pendidikan dan pelatihan tentang pendidikan inklusi dan bagi perguruan tinggi khususnya Jurusan PGPAUD memprogram mata kuliah pendidikan inklusi agar mahasiswa memiliki pengetahuan inklusi dan mampu memberikan pelayanan yang optimal sesuai dengan kebutuhan ABK di kelasnya nanti.

2.6. Kerangka Pikir

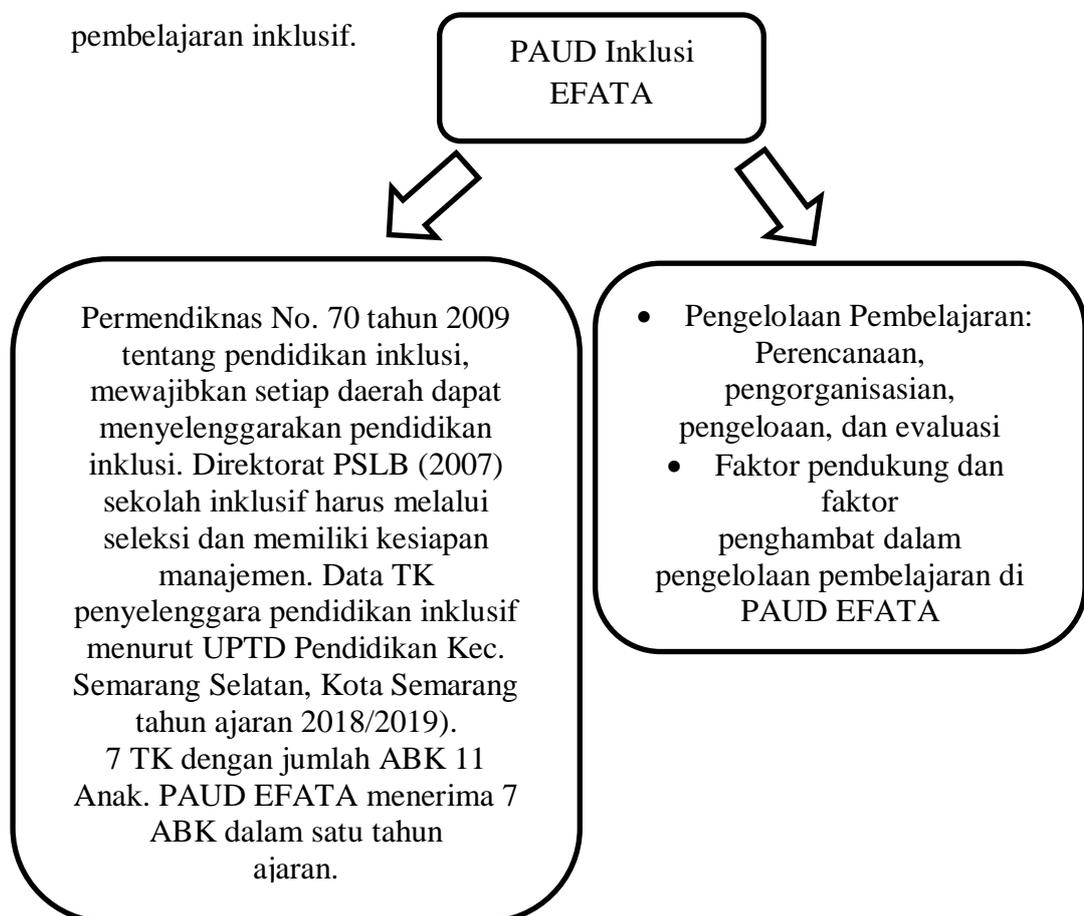
Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam kemajuan dan pembangunan suatu bangsa. Terkait dengan peluang untuk memperoleh pendidikan, disebutkan pula dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Kependidikan Nasional pasal 5 ayat 1 bahwa warga negara Indonesia yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Undang-undang tersebut menunjukkan bahwa anak berkebutuhan khusus

memperoleh kesempatan yang sama dengan anak-anak yang normal dalam pendidikan.

Pendidikan inklusi dianggap sebagai suatu alternatif penyelenggaraan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Pendidikan inklusi adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan dan pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Melalui pendidikan inklusi, anak berkebutuhan khusus dapat memperoleh kesempatan belajar yang sama, berinteraksi dan berkerja sama secara efektif dalam suatu sekolah dengan siswa normal lainnya tanpa membedakan fisik, suku, budaya, kecerdasan maupun keadaan sosial ekonomi.

Program pendidikan inklusi bagi anak berkebutuhan khusus telah diatur dalam Peraturan menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 tahun 2009. Anak berkebutuhan khusus perlu mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan hak asasinya. Peraturan menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 tahun 2009 adalah amanah yang sudah selayaknya untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Peraturan tersebut sesungguhnya sudah sangat jelas bagaimana setiap kabupaten kota atau kecamatan harus menyelenggarakan pendidikan inklusif. Peraturan tersebut juga telah dipaparkan secara jelas bagaimana konsekuensi sebagai hak dan kewajiban yang harus dilakukan.

Pengelolaan pembelajaran inklusi dipengaruhi oleh faktor-faktor, baik itu faktor yang mendukung maupun faktor yang menghambat pendidikan inklusi. Faktor-faktor tersebut meliputi: lingkungan, sumberdaya dan komunikasi. Peneliti juga akan melihat program sekolah inklusi karena dalam proses pengelolaan pembelajaran inklusi di PAUD EFATA yang menerapkan program sekolah inklusi. Selain itu peneliti akan melihat perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan dan evaluasi pembelajaran inklusif.



Gambar 2.2. Kerangka pikir

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian mengenai pengelolaan pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus (studi di PAUD EFATA Kota Semarang) dapat disimpulkan sebagai berikut:

5.1.1. Pengelolaan pembelajaran terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, dan evaluasi hasil pembelajaran. Pengelolaan pembelajaran di PAUD EFATA disimpulkan sebagai berikut:

1. Perencanaan pembelajaran di di PAUD EFATA meliputi: kurikulum, penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran, penentuan tema dan sub tema, perencanaan metode, media, dan *setting* lingkungan. Kurikulum yang digunakan di PAUD EFATA adalah kurikulum PAUD 2013. Perencanaan metode pembelajaran yang akan digunakan untuk mengimplementasikan rencana meliputi kegiatan nyata seperti halnya bercerita menggunakan media gambar, video, demonstrasi, dan tanya jawab yang bersifat pembiasaan, pengulangan, dan praktek langsung. Perencanaan media di PAUD EFATA mengungkap konsep menghadirkan alat/ objek nyata dan realistis sehingga anak dapat melakukan pengamatan secara langsung, media yang dekat dengan anak, dan memanfaatkan sarana dan prasarana yang

sudah tersedia serta bekerja sama dengan orang tua terkait pengadaan media bermain sesuai kegiatan main anak. perencanaan *setting* lingkungan di PAUD EFATA didasari oleh aspek keamanan dan kenyamanan anak dalam bermain, disesuaikan dengan kegiatan main anak.

2. Pengorganisasian pembelajaran di PAUD EFATA melibatkan guru kelas yang bertugas melaksanakan kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup. PAUD EFATA belum memiliki guru pendamping khusus guna memberikan bantuan program bimbingan bagi guru serta memberikan bantuan dalam pengembangan kurikulum, program pendidikan individual, dan bantuan professional. Pelaksanaannya guru menyarankan untuk ke psikolog dan menyarankan ke RDRM guna membantu guru dalam kegiatan bermain dan proses penilaian. singkatan dari Rumah Duta Revolusi Mental adalah tempat perlindungan dan bantuan hukum korban kekerasan dan *bullying* khususnya pada perempuan dan anak.
3. Pengelolaan pembelajaran di PAUD EFATA melibatkan peran kepala sekolah sebagai pemimpin dan supervisor dalam upaya pengembangan lembaga. Kepala sekolah menjalankan perannya dengan baik berupa pemberian upaya pengembangan kompetensi bagi guru. Melaksanakan tugasnya sebagai supervisi berupa pemberian bimbingan dan motivasi bagi guru dalam upaya

pengembangan lembaga namun belum ternarasi dan terprogram. Kemudian pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat dilakukan dalam bentuk mensosialisaikan lembaga melalui kemitraan dan aktif dalam kegiatan yang berhubungan dengan anak.

4. Evaluasi pembelajaran di PAUD EFATA kegiatan pengelolaan pembelajaran secara menyeluruh sudah sesuai dengan tujuan lembaga. Upaya tindak lanjut terstruktur dalam program tahunan yang memasukkan kegiatan pengayaan guna melengkapi kompetensi dasar dan kompetensi inti yang belum tercapai. Dikuatkan melalui kegiatan parenting yang didalamnya memuat evaluasi kurikulum dan saran guna penembangan lembaga.

5.1.2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan pembelajaran di PAUD EFATA sebagai berikut:

1. Faktor pendukung dalam pengelolaan pembelajaran di PAUD EFATA dapat diketahui bahwa faktor pendukung pengelolaan pembelajaran berupa bantuan, pembimbingan, dan pemberian informasi dari HIMPAUDI Kota Semarang. Komitmen dan peran guru serta orang tua yang mendukung tercapainya tujuan lembaga.
2. Faktor penghambat dalam pengelolaan pembelajaran di PAUD EFATA meliputi ketersediaan sarana dan prasarana yang terbatas, meliputi ruangan dan tempat pelaksanaan kegiatan yang belum

memiliki lahan pribadi, dan belum dimilikinya izin pendirian PAUD. Terkendala standar penyelenggaraan PAUD inklusi.

5.2. Saran

Berdasarkan penelitian yang sudah dilaksanakan di PAUD EFATA terkait pengelolaan pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus, peneliti memiliki beberapa saran yang dapat diberikan, antara lain:

5.2.1. Guru

Perlunya penguatan disiplin, seperti halnya jam kedatangan anak yang belum efektif, hal tersebut dapat memberikan dampak negatif bagi anak yang berangkat tepat waktu dan mengulur waktu efektif kegiatan pembelajaran. Perlu adanya perencanaan pembelajaran individu bagi anak berkebutuhan khusus mengingat tingkat pencapaian perkembangan anak yang spesial, serta diperlukan kegiatan main tambahan.

5.2.2. Lembaga

Terkait pendampingan, dan kegiatan supervisi sangat diperlukan bagi pengembangan lembaga terutama yang dilakukan oleh ketua rumah pintar juga selaku pendiri PAUD EFATA. Perlu diadakannya guru pembimbing khusus guna memberikan bantuan, pembimbingan bagi guru, dan assessment untuk anak berkebutuhan khusus.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, M. (2009). *Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ahmadi. A. (2005). *Strategi Belajar Mengajar*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Alimin, Z. (2010). *Assesment Keterampilan Membaca dan Matematika / Aritmatika Bagi Anak Berkebutuhan Khusus*. Jakarta: Kemendiknas.
- Ara Hidayat & Imam. (2010). *Pengelolaan Pendidikan*. Bandung: Pustaka Educa.
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, S. A. (2008). *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Arum, W. S. (2005). *Perspektif Pendidikan Luar Biasa dan Implikasinya Bagi Penyiapan Tenaga Kependidikan*. Jakarta: Depdikas.
- Asmariansi. (2016). *Konsep Media Pembelajaran AUD*. Universitas Islam Indragiri Riau
- Bartolo A.P. (2016). *Ensuring a Strong Start for All Children: Inclusive Early Childhood Education and Care*. Emerald Group Publishing Limited. 8
- Basyirudin, U. (2002). *Metodologi Pembelajaran Agama Islam*. Jakarta: PT Intermedia.
- Biasa, D. P. (n.d.). *Pedoman Umum Pendidikan Inklusi*. 2007.
- Brusick, M. F. (2011). *Menuju Pendidikan Inklusif Panduan Praktis untuk Mengajar*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Budiyanto. (2005). *Pengantar Pendidikan Inklusif Berbasis Budaya Lokal*. Jakarta : Depdiknas.
- Budiyanto, d. (2012). *Modul Pelatihan Pendidikan Inklusif*. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Dasar.

- Delhie, B. (2005). *Bimbingan Konseling untuk Perilaku non Adaptif*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- Desiningrum, D. R. (2016). *Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta: Psikosain.
- Diana. (2017). *Model-Model Pembelajaran Anak Usia Dini*. Yogyakarta: deepublish.
- Direktorat Pendidikan Luar Biasa. (2004). *Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa.
- Febriana, N. U. (2016). *Permasalahan dalam Pengelolaan Pendidikan Inklusif di SDN Piyaman III Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul*. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Yogyakarta: Yogyakarta.
- Futhurrohman. P. & M. Sobry. S. (2007). *Strategi Belajar Mengajar Melalui Penanaman Konsep Umum dan Islami*. Bandung: Rafika Aditama
- Ginting. A. (2008). *Esensi Praktis Belajar dan Pembelajaran*. Bandung: Humaniora.
- Hadist, A. (2006). *Pendidikan ABK Autistik*. Bandung: Alfabeta.
- Hallahan, D. P. (2006). *Exceptional Children: An Introduction to Special Education*. Boston: Pearson.
- Hapidin, d. (2007). *Manajemen Pendidikan TK (IV ed.)*. (T. D. UPI, Ed.) Jakarta: Alfabeta.
- Hartanti, S. (2017). Pelayanan Anak Berkebutuhan Khusus di TK Tiji Salsabila Kota Padang. *PEDAGOGI: Jurnal Anak Usia Dini dan Pendidikan Anak Usia Dini*, 193-196.
- Hamalik. O. (1989). *Media Pendidikan*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Hamalik. O. (2008). *Manajemen Pengembangan Kurikulum*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.

- Handoko, T. (2011). *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta
- Hidayat, A, dkk. (2010). *Pengelolaan Pendidikan "Konsep, Prinsip, dan Aplikasi dalam Mengelola Sekolah dan Madrasah"*. Bandung: Pustaka Educa
- Hikmat. (2009). *Manajemen Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ilahi, M. T. (2013). *Pendidikan Inklusi dan Aplikasi*. Yogyakarta: Ar Ruzz Media.
- Iswari, M. (2007). *Kecakapan Hidup Bagi Anak Berkebutuhan Khusus*. Jakarta: Depdiknas.
- Johnson, B. &. (2003). *Pendidikan Kebutuhan Khusus (Sebuah Pengantar Terjemahan ed.)*. Bandung: Program Pasca Sarjana UPI.
- Janosky, M. (2016). Inclusive Early Childhood Classroom Management Plan. *Honors Projects*, 211.
- Kaufman, J. M. (1997). *Exceptional Children Introduction to Special Education*. London: Prentice Hall International Inc.
- Kustawan, D. (2016). *Manajemen Pendidikan Inklusif Kiat Sukses mengelola Pendidikan Inklusif di Sekolah Umum dan Kejuruan*. Jakarta: Luximia.
- Lis, A. &. (2010). *Pendidikan Anak Tunagrahita*. Bandung: CV Catur Karya Mandiri.
- Latif M, Z. R. (2013). *Orientasi Baru Pendidikan Anak Usia Dini*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Makmun, U. S. (2007). *Perencanaan Pendidikan (Cetakan ketiga ed.)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Mangunsong, F. (2009). *Psikologi dan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus*. Depok: Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi.
- Marilyn Friend, W. D. (2015). *Menuju Pendidikan Inklusi*. (A. Nuriowandari, Trans.) Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Marthan, Ley Kekeh. (2007). *Managemen Pendidikan Inklusif*. Jakarta: Dirjen Dikti.
- Masitah. R. (2016). Pendidikan Inklusif Anak Usia Dini. *The Progressive and Fun Education Seminar*. Fakultas Agama Islam UMSU. Sumatra Utara
- Maulipaksi, D. (2017, 2). Retrieved 2 Rabu, 2019, from Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan: <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2017/02/sekolah-inklusi-dan-pembangunan-slb-dukung-pendidikan-inklusi>
- Meimulyani, D. K. (2016). *Mengenal Pendidikan Khusus dan Pelayanan Pendidikan Khusus serta Implementasinya* . Jakarta: Luxima.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya Offset.
- Mudjito A.K, H. E. (2012). *Pendidikan Inklusif*. Jakarta: Baduose Media Jakarta.
- Mukhtar. (2003). Desain Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Jakarta: C. V. Ikapi. Cetak. II. hlm. 147.
- Mulyono, A. (2009). *Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Prapsiwi, D. (2012). *Pengelolaan Pembelajaran Anak Usia Dini*. Surakarta. UMS.
- Primadi, O. (2014). *Situasi Penyandang Disabilitas*. *Buletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan*, 6-7.
- Sanjaya. W. (2008). *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Santrock, John. W. 2007. *Perkembangan Anak*. (Terjemahan, Jilid 1). Jakarta: Erlangga
- Smith, J. D. (2006). *Inklusif Sekolah Ramah Untuk Semua*. Bandung: Nuansa Cendikia.

- Smith, J. D. (2014). *Konsep Inklusif Konsep dan Penerapan Pembelajaran*. Bandung: Nuansa Cendikian.
- Suhadi, F. M. (2009). *Syarah Hadist Arba'in an-Nawawi*. Bandung: MQS Publishing.
- Sutomo, Titi. P, Rafika. B. K. (2016). *Manajemen Sekolah*. Semarang. UNNES Press
- Sumiyati. (2011). *PAUD Inklusi PAUD Masa Depan*. Yogyakarta: Cakrawala Institute.
- Suparno. (2010). *Jurnal Pendidikan Khusus*. Yogyakarta: Jurusan PLS UNY.
- Sugiono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Suparno. (2010). *Jurnal Pendidikan Khusus*. Yogyakarta: Jurusan PLS UNY.
- Susnanto, Juang. (2009). *Implementasi Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar*. Bandung: Pusat Kajian dan Inovasi Pendidikan. Sekolah Pasca Sarjana UPI.
- Tilaar, H. A. (1997). *Manajemen Pendidikan Nasional*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Turnoyo. (2015). *Pengelolaan Usaha Pertambangan*. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Purwokerto: Purwokerto.
- Ulfah, F. (2015). *Manajemen PAUD Pengembangan Jejaring Kemitraan Belajar*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- UPI, T. D. (2011). *Manajemen Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Winarsih, D. (2013). *Panduan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus Bagi Pendamping (orang tua, keluarga, dan masyarakat)*. Jakarta:

Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Republik Indonesia.

Yusuf, T. & Saiful. A. (1997). *Metodologi Pengajaran Agama dan Bahasa Arab*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 7-10